RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
(RENJA-PD)
TAHUN 2025

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

PEMERINTAH KABUPATEN TANGGAMUS

TAHUN 2024

PEMERINTAH KABUPATEN TANGGAMUS
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Jalan Gatot Subroto No. 4 Telp. (0722) 21755, 21511 Fax. 21755
KOTA AGUNG

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN TANGGAMUS
NOMOR : 050 / 1364 / 26 / 2024

TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2025

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN TANGGAMUS,

Menimbang : bahwa sesuai ketentuan Pasal 21 ayat (3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Pasal 126 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu mengatur Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanggamus Tahun 2025 dengan Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil ;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3667);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pelaksanaan Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Laporan Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesiatahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);

12. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);

13. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6909);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

16. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 868);

17. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1891);

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Bencana Daerah

Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1541);

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1619);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Di Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 158);
21. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 68);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
25. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 677);
26. Keputusan Menteri Dalam Negeri 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan

Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

27. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Lampung Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2007 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 314);
28. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 55 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025-2026 (Berita Daerah Provinsi Lampung Tahun 2024 Nomor 55);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 01 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Tanggamus Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2008 Nomor 27);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 16 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tanggamus Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2011 Nomor 71, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 18);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tanggamus (Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2016 Nomor 142, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 47) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tanggamus (Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 202 Nomor 212, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 102);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 06 Tahun 2017 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2017 Nomor 151, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 55) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Daerah

Kabupaten Tanggamus Tahun 2023 Nomor 214, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 103);

33. Peraturan Daerah KabupatenTanggamus Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan RetribusiDaerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2024 Nomor 220, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 106);

34. Peraturan Bupati Tanggamus Nomor 11 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2023 Nomor 843);

35. Peraturan Bupati Tanggamus Nomor 21 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2024 Nomor 888);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanggamus Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2005-2025 dan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2024-2026.

KETIGA : Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU disajikan dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan

BAB II : Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu

BAB III : Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

BAB IV : Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

BAB V : Penutup

KEEMPAT : Lampiran sebagaimana dimaksud dalam diktum KETIGA merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kota Agung
pada tanggal, 10 Juli 2024

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN TANGGAMUS,

MARADONA, S.STP., M.Si
NIP. 19790903 199810 1 001

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Karena berkat Rahmat dan Karunia-Nya kami dapat menyelesaikan Sistematika Penyusunan RENJA-PD Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanggamus Tahun Anggaran 2025. Disamping itu, laporan Rencana Kinerja ini juga dimaksudkan untuk dapat memberikan gambaran Tujuan Pemerintah Daerah dan Sasaran Pemerintah Daerah, tujuan strategi, dan kebijakan terhadap program dan kegiatan serta arah kebijaksanaan dalam rangka meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan program yang bermuara pada peningkatan pelayanan umum kepada masyarakat, laporan ini pula disusun dalam kerangka acuan dan pedoman Pembangunan Jangka Menengah Pemerintah Kabupaten Tanggamus khususnya di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam kurun waktu tersebut.Dalam sistematika penulisan penyusunan Renja PD ini, kami menyadari sepenuhnya masih banyak terdapat kekurangan dan kelemahan namun, hal itu bukan suatu unsur kesengajaan akan tetapi semata hanya karena keterbatasan yang ada pada kami.

Karena saran dan pendapat untuk kesempurnaan penyusunan Renja PD ini pada tahun mendatang saat ini Kami harapkan.

Demikian laporan ini dibuat untuk dipergunakan sebagimana mestinya.

Kotaagung, 10 Juli 2024
Kepala Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil

MARADONA, S.STP., M.Si
NIP. 19790903 199810 1 001

DAFTAR ISI

1. Kata pengantar i

2. Daftar isi..... ii

3. Daftar Tabel iii

4. Bab-bab yang terdiri dari :

BAB I PENDAHULUAN 1

1.1 Latar Belakang..... 1

1.2 Landasan Hukum..... 3

1.3 Maksud dan Tujuan..... 6

1.4 Sistematika..... 6

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU 8

2.1 Gambaran Umum Perangkat Daerah..... 8

2.2 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2023..... 9

2.3 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah..... 19

2.4 Isu-isu Penting Penyelenggara Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah 23

2.5 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD..... 24

2.6 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat ... 33

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH..... 36

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional..... 36

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah..... 52

3.3 Program dan Kegiatan..... 52

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH..... 61

4.1 Program dan Kegiatan..... 61

BAB V PENUTUP 72

DAFTAR TABEL

Tabel 1. REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA PD DAN PENCAPAIAN RENSTRA PD S/D TAHUN 2024 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN TANGGAMUS 7

Tabel 2. PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN PD DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN TANGGAMUS…….. 22

Tabel 3. REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD KABUPATEN TANGGAMUS TAHUN 2025 25

Tabel 4. USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN DARI PARA PEMANGKU KEPENTINGAN TAHUN 2025 KABUPATEN TANGGAMUS ……..…… 35

Tabel 5. IDENTIFIKASI KEBIJAKAN NASIONAL DAN PROVINSI PD KABUPATEN TANGGAMUS 51

Tabel 6. RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PD TAHUN 2024 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2025 KABUPATEN TANGGAMUS SUMBER DANA APBD KABUPATEN TANGGAMUS 53

Tabel 7. RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PD TAHUN 2024 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2025 KABUPATEN TANGGAMUS SUMBER DANA APBD PROVINSI …… 59

Tabel 8. RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PD TAHUN 2024 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2025 KABUPATEN TANGGAMUS SUMBER DANA APBN …….. 60

Tabel 9. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH TAHUN 2025 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2026 KABUPATEN TANGGAMUS…… 67

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DINAS
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPTEN TANGGAMUS
NOMOR : 050 / 1364 / 26 / 2024
TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2025 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN TANGGAMUS

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan undang – undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, memberikan kewenangan kepada Daerah Kota/Kabupaten untuk mengurus dan memajukan daerahnya sendiri. Hal ini, diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui pelayanan, pemberdayaan, dan peran masyarakat.

Dengan adanya Otonomi Daerah tentunya diharapkan Pemerintah Daerah mampu meningkatkan daya saing melalui prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan dalam pembangunan, meningkatkan daya guna, potensi dan keanekaragaman sumberdaya daerah.

Dalam pelayanan dan mekanisme Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil saat ini telah diberlakukan undang – undang Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2007 tentang pelaksanaan undang – undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Admistrasi Kependudukan, peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, perlu juga diinformasikan dengan berlakunya

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang organisasi dan perangkat daerah dengan memperhatikan berbagai perkembangan, permasalahan dan tantangan yang akan dihadapi dimasa mendatang.

Agar berbagai program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dimasa yang akan datang dapat berhasil dengan baik, maka harus disusun dalam suatu perencanaan yang mendatang. Perencanaan yang disusun harus mempertimbangkan keadaan yang ada dan memprediksi keadaan yang akan datang dengan berbagai dukungan dan hambatan yang mungkin timbul.

Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2024- 2026 merupakan penjabaran program selama 3 tahun kedepan yang melalui setiap tahapan dari proses pembangunan berkelanjutan dari tahun ke tahun di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dan mengingat pembangunan Nasional maka Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2024-2026 disingkronkan dengan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Tanggamus Tahun 2024-2026 dan RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2019 – 2024.

Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2024–2026 pelaksanaannya akan dituangkan dalam Rencana Kerja Tahunan (RKT) setiap tahun selama 3 tahun, yang kemudian menjadi dasar dalam penyusunan Anggaran Belanja Pendapatan Daerah (APBD) setiap tahunnya.

Hal ini menunjukkan bahwa dokumen perencanaan saling berkaitan satu dengan yang lainnya baik antar waktu maupun antar tingkatan perencanaan, dengan demikian pembangunan di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil bersifat berkelanjutan dan saling terkait secara sektoral maupun wilayah.

Suatu perencanaan pembangunan apapun bentuknya akan berhasil mencapai sasaran yang diharapkan terkait dengan data kependudukan yang baik dan akurat. Dengan

demikian pembangunan sector Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan barometer bagi perencanaan pembangunan sector lainnya.

1.2 Landasan Hukum

Rencana strategis disusun berdasarkan landasan hukum , aturan – aturan yang berlaku yaitu :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus ;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional ;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 ;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang ;
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pelaksanaan Pembangunan ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah;
12. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 ;

13. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan ;

14. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional ;

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah ;

16. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota ;

17. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat ;

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota ;

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota ;

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Di Provinsi dan Kabupaten/Kota ;

21. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan ;

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah ;

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah ;

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal ;

25. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan ;

26. Keputusan Menteri Dalam Negeri 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

27. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Lampung Tahun 2005–2025 ;

28. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 55 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025-2026 ;

29. Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 01 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Tanggamus Tahun 2005-2025 ;

30. Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 16 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tanggamus Tahun 2011-2031 ;

31. Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tanggamus, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tanggamus ;

32. Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 06 Tahun 2017 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan ;

33. Peraturan Daerah KabupatenTanggamus Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan RetribusiDaerah ;

34. Peraturan Bupati Tanggamus Nomor 11 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026 ;

35. Peraturan Bupati Tanggamus Nomor 21 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 ;

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2025 adalah sebagai dokumen arah perencanaan Pembangunan yang memberikan arah kebijakan keuangan, strategi dan kebijakan, program dan sasaran – sasaran strategi yang ingin dicapai selama 1 tahun mendatang.

Tujuan dari penyusunan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil ini adalah untuk menjabarkan Tujuan Pemerintah Daerah dan Sasaran Pemerintah Daerah yang ada pada RPJMD 2024-2026, Dimana Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil masuk dalam Sasaran Pemerintah Daerah yaitu **"Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dan Daya Saing Daerah"**.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.2 Landasan Hukum

1.3 Maksud dan Tujuan

1.4 Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAHTAHUN LALU

2.1 Gambaran Umum Perangkat Daerah

2.2 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2023

2.3 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

2.4 Isu-isu Penting Penyelenggara Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

2.5 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

2.6 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1 Program dan Kegiatan

BAB V PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Gambaran Umum Perangkat Daerah

Dinas kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten Tanggamus beralamat di Jalan Gatot Subroto No. 4, Kampung Baru Kecamatan kotaagung Timur. Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil terbentuk berdasarkan peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat daerah kabupaten Tanggamus dan Peraturan Bupati Tanggamus Nomor 39 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten tanggamus. Jumlah penduduk Kabupaten Tanggamus di tahun 2024 sebanyak 638.652 jiwa terdiri dari laki-laki 329.914 jiwa dan perempuan 308.738 jiwa, dengan rincian sebagai berikut:

Jumlah Penduduk Kabupaten Tanggamus 2024

NO	KECAMATAN	PENDUDUK TAHUN 2024		JUMLAH
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	
1	KOTA AGUNG	24.448	23.273	47.721
2	TALANG PADANG	26.844	25.720	52.564
3	WONOSOBO	21.512	20.244	41.756
4	PULAU PANGGUNG	20.720	19.835	40.555
5	CUKUH BALAK	12.662	11.491	24.153
6	PUGUNG	33.610	31.241	64.851
7	SEMAKA	20.176	18.845	39.021
8	SUMBER REJO	19.027	18.043	37.070
9	ULU BELU	22.640	21.059	43.699
10	PEMATANG SAWA	9.272	8.118	17.390
11	KLUMBAYAN	6.027	5.335	11.362
12	KOTA AGUNG BARAT	12.125	11.090	23.215
13	KOTA AGUNG TIMUR	11.395	10.896	22.291
14	GISTING	22.194	21.114	43.308
15	GUNUNG ALIP	11.278	10.611	21.889
16	LIMAU	10.862	9.990	20.852
17	BANDAR NEGERI SEMUONG	8.567	7.883	16.450
18	AIR NANINGAN	16.289	15.039	31.328
19	BULOK	12.793	11.989	24.782
20	KLUMBAYAN BARAT	7.473	6.922	14.395
JUMLAH		**329.914**	**308.738**	**638.652**

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanggamus, Semester I Tahun 2024

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa jumlah penduduk kabupaten Tanggamus Tahun 2024 yang tertinggi ada pada Kecamatan Pugung Sebanyak 64.851 jiwa dan jumlah penduduk yang terendah ada pada Kecamatan Kelumbayan sebanyak 11.362 jiwa.

2.2 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2023

Pada Tahun 2023 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melaksanakan 5 Program, 9 Kegiatan dan 25 Sub kegiatan dengan Belanja Operasi sebesar Rp.7.842.716.856,00 dan Belanja Modal sebesar Rp.239.264.500,00 dengan total Belanja Daerah Rp.8.081.981.356,00 yang teralisasi sebesar Rp.6.471.524.408,00 atau 80,07 % sampai dengan triwulan ke IV.

Secara terinci Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2023 dijabarkan sebagai berikut :

1) Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kab/Kota, Pelaksanaan kegiatan ini berlokasi di Kecamatan Kotaagung Timur dengan pencapaian kinerja sampai dengan triwulan ke IV tahun 2023 yaitu 100% dengan pencapaian kinerja sebesar 86,96% dengan anggaran sebesar Rp.8.077.156.656,00 yang terealisasi sebesar Rp.6.471.374.408,00 atau 80,12% dengan rincian 5 Kegiatan dan 17 Sub Kegiatan sebagai berikut :
   a) Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, Pelaksanaan kegiatan ini berlokasi di Kecamatan Kotaagung Timur dengan pencapaian kinerja sampai dengan triwulan ke IV tahun 2023 yaitu 100% dengan pencapaian kinerja sebesar 93,75% dengan anggaran sebesar Rp.4.476.700,00 yang terealisasi sebesar Rp.1.010.000,00 atau 22,56%, Kegiatan ini terdiri dari 7 Sub Kegiatan dengan rincian Sub Kegiatan sebagai berikut :
      1.) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, Pelaksanaan kegiatan ini berlokasi di Kecamatan Kotaagung Timur dengan pencapaian kinerja sampai dengan triwulan ke IV tahun 2023 yaitu 3 Dokumen dengan pencapaian kinerja sebesar 2 Dokumen dengan anggaran sebesar Rp. 2.151.700,00 yang terealisasi sebesar Rp. 1.010.000,00 atau 46,94%

2.) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Pelaksanaan kegiatan ini berlokasi di Kecamatan Kotaagung Timur dengan pencapaian kinerja sampai dengan triwulan ke IV tahun 2023 yaitu 1 Dokumen dengan pencapaian kinerja sebesar 1 Dokumen dengan anggaran sebesar Rp. 375.000,00 yang terealisasi sebesar Rp.0 atau 0%

3.) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Pelaksanaan kegiatan ini berlokasi di Kecamatan Kotaagung Timur dengan pencapaian kinerja sampai dengan triwulan ke IV tahun 2023 yaitu 1 Dokumen dengan pencapaian kinerja sebesar 1 Dokumen dengan anggaran sebesar Rp. 375.000,00 yang terealisasi sebesar Rp.0 atau 0%

4.) Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Pelaksanaan kegiatan ini berlokasi di Kecamatan Kotaagung Timur dengan pencapaian kinerja sampai dengan triwulan ke IV tahun 2023 yaitu 1 Dokumen dengan pencapaian kinerja sebesar 1 Dokumen dengan anggaran sebesar Rp. 375.000,00 yang terealisasi sebesar Rp.0 atau 0%

5.) Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD Pelaksanaan kegiatan ini berlokasi di Kecamatan Kotaagung Timur dengan pencapaian kinerja sampai dengan triwulan ke IV tahun 2023 yaitu 1 Dokumen dengan pencapaian kinerja sebesar 0 Dokumen dengan anggaran sebesar Rp. 600.000,00 yang terealisasi sebesar Rp.0 atau 0%

6.) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Pelaksanaan kegiatan ini berlokasi di Kecamatan Kotaagung Timur dengan pencapaian kinerja sampai dengan triwulan ke IV tahun 2023 yaitu 6 Laporan dengan pencapaian kinerja sebesar 6 Laporan dengan anggaran sebesar Rp. 225.000,00 yang terealisasi sebesar Rp.0,00 atau 0%

7.) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, Pelaksanaan kegiatan ini berlokasi di Kecamatan Kotaagung Timur dengan pencapaian kinerja sampai dengan triwulan ke IV tahun 2023 yaitu 3 Laporan dengan pencapaian kinerja sebesar 3 Laporan dengan anggaran sebesar Rp. 375.000,00 yang terealisasi sebesar Rp. 0 atau 0%

b) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, Pelaksanaan kegiatan ini berlokasi di Kecamatan Kotaagung Timur dengan pencapaian kinerja sampai dengan triwulan ke IV tahun 2023 yaitu 100% dengan pencapaian kinerja sebesar 100 % dengan anggaran sebesar Rp.6.055.085.116,00 yang terealisasi sebesar Rp.5.703.220.416,00 atau 94,19 %, Kegiatan ini terdiri dari 3 Sub Kegiatan dengan rincian Sub Kegiatan sebagai berikut :

1.) Penyediaan Gaji dan Tunjangan, Pelaksanaan kegiatan ini berlokasi di Kecamatan Kotaagung Timur dengan pencapaian kinerja sampai dengan triwulan ke IV tahun 2023 yaitu 34 Orang dengan pencapaian kinerja sebesar 34 Orang dengan anggaran sebesar Rp.4.415.915.116,00 yang terealisasi sebesar Rp.4.173.235.416,00 atau 94,50%

2.) Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN, Pelaksanaan kegiatan ini berlokasi di Kecamatan Kotaagung Timur dengan pencapaian kinerja sampai dengan triwulan ke IV tahun 2023 yaitu 12 Dokumen dengan pencapaian kinerja sebesar 12 Dokumen dengan anggaran sebesar Rp. 1.624.310.000,00 yang terealisasi sebesar Rp. 1.526.635.000,00 atau 93,99%

3.) Pelaksanaan Penatausahaan dan Penguji/Verifikasi Keuangan SKPD, Pelaksanaan kegiatan ini berlokasi di Kecamatan Kotaagung Timur dengan pencapaian kinerja sampai dengan triwulan ke IV tahun 2023 yaitu 12 Dokumen dengan pencapaian kinerja sebesar 12 Dokumen dengan anggaran sebesar Rp.14.860.000,00 yang terealisasi sebesar Rp. 3.350.000,00 atau 22,54%

c) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, Pelaksanaan kegiatan ini berlokasi di Kecamatan Kotaagung Timur dengan pencapaian kinerja sampai dengan triwulan ke IV tahun 2023 yaitu 100% dengan pencapaian kinerja sebesar 80% dengan anggaran sebesar Rp.303.853.440,00 yang terealisasi sebesar Rp.170.650.610,00 atau 56,16%, Kegiatan ini terdiri dari 4 Sub Kegiatan dengan rincian Sub Kegiatan sebagai berikut :

1.) Penyediaan Bahan Logistik Kantor, Pelaksanaan kegiatan ini berlokasi di Kecamatan Kotaagung Timur dengan pencapaian kinerja sampai dengan triwulan ke IV tahun 2023 yaitu 1 Paket dengan pencapaian kinerja sebesar 1 Paket dengan anggaran sebesar Rp.39.093.000,00 yang terealisasi sebesar Rp.4.200.000,00 atau 10,74%
2.) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan, Pelaksanaan kegiatan ini berlokasi di Kecamatan Kotaagung Timur dengan pencapaian kinerja sampai dengan triwulan ke IV tahun 2023 yaitu 1 Paket dengan pencapaian kinerja sebesar 1 Paket dengan anggaran sebesar Rp.25.311.400,00 yang terealisasi sebesar Rp.13.311.400,00 atau 52,59%
3.) Penyediaan Bahan/Material, Pelaksanaan kegiatan ini berlokasi di Kecamatan Kotaagung Timur dengan pencapaian kinerja sampai dengan triwulan ke IV tahun 2023 yaitu 1 Paket dengan pencapaian kinerja sebesar 1 Paket dengan anggaran sebesar Rp.88.021.040,00 yang terealisasi sebesar Rp.56.046.100,00 atau 63,67%
4.) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, Pelaksanaan kegiatan ini berlokasi di Kecamatan Kotaagung Timur dengan pencapaian kinerja sampai dengan triwulan ke IV tahun 2023 yaitu 27 laporan dengan pencapaian kinerja sebesar 21 laporan dengan anggaran sebesar Rp.151.428.000,00 yang terealisasi sebesar Rp.97.093.110,00 atau 64,12%

d) Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, Pelaksanaan kegiatan ini berlokasi di Kecamatan Kotaagung Timur dengan pencapaian kinerja sampai dengan triwulan ke IV tahun 2023 yaitu 100% dengan pencapaian kinerja sebesar 88,24% dengan anggaran sebesar Rp.1.491.466.600,00 yang terealisasi sebesar Rp.436.192.297,00 atau 29,25%, Kegiatan ini terdiri dari 3 Sub Kegiatan dengan rincian Sub Kegiatan sebagai berikut :
1.) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, Pelaksanaan kegiatan ini berlokasi di Kecamatan Kotaagung Timur dengan pencapaian kinerja sampai dengan triwulan ke IV tahun 2023 yaitu 12 Laporan dengan pencapaian kinerja sebesar

12 Laporan dengan anggaran sebesar Rp.202.066.500,00 yang terealisasi sebesar Rp.155.081.397,00 atau 76,75%

2.) Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor, Pelaksanaan kegiatan ini berlokasi di Kecamatan Kotaagung Timur dengan pencapaian kinerja sampai dengan triwulan ke IV tahun 2023 yaitu 10 Laporan dengan pencapaian kinerja sebesar 6 Laporan dengan anggaran sebesar Rp.1.190.877.100,00 yang terealisasi sebesar Rp.202.675.700,00 atau 17,02%

3.) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor, Pelaksanaan kegiatan ini berlokasi di Kecamatan Kotaagung Timur dengan pencapaian kinerja sampai dengan triwulan ke IV tahun 2023 yaitu 12 Laporan dengan pencapaian kinerja sebesar 12 Laporan dengan anggaran sebesar Rp.98.523.000,00 yang terealisasi sebesar Rp.78.435.200,00 atau 79,61%

e) Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, Pelaksanaan kegiatan ini berlokasi di Kecamatan Kotaagung Timur dengan pencapaian kinerja sampai dengan triwulan ke IV tahun 2023 yaitu 100% dengan pencapaian kinerja sebesar 91,67% dengan anggaran sebesar Rp.222.274.800,00 yang terealisasi sebesar Rp.160.301.085,00 atau 72,12%, Kegiatan ini terdiri dari 4 Sub Kegiatan dengan rincian Sub Kegiatan sebagai berikut :

1.) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan, Pelaksanaan kegiatan ini berlokasi di Kecamatan Kotaagung Timur dengan pencapaian kinerja sampai dengan triwulan ke IV tahun 2023 yaitu 1 Unit dengan pencapaian kinerja sebesar 1 Unit dengan anggaran sebesar Rp.34.538.000,00 yang terealisasi sebesar Rp. 23.274.000,00 atau 67,39%

2.) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, Pelaksanaan kegiatan ini berlokasi di Kecamatan Kotaagung Timur dengan pencapaian kinerja sampai dengan triwulan ke IV tahun 2023 yaitu 5 Unit dengan pencapaian kinerja sebesar 5 Unit dengan anggaran sebesar Rp.122.603.800,00 yang terealisasi sebesar Rp. 96.674.085,00 atau 78,85%

3.) Pemeliharaan dan Peralatan Mesin Lainnya, Pelaksanaan kegiatan ini berlokasi di Kecamatan Kotaagung Timur dengan pencapaian kinerja sampai dengan triwulan ke IV tahun 2023 yaitu 39 Unit dengan pencapaian kinerja sebesar 26 Unit dengan anggaran sebesar Rp. 43.320.000,00 yang terealisasi sebesar Rp.18.540.000,00 atau 42,80%

4.) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya, Pelaksanaan kegiatan ini berlokasi di Kecamatan Kotaagung Timur dengan pencapaian kinerja sampai dengan triwulan ke IV tahun 2023 yaitu 1 Unit dengan pencapaian kinerja sebesar 1 Unit dengan anggaran sebesar Rp.21.813.000,00 yang terealisasi sebesar Rp. 21.813.000,00 atau 100%

2) Program Pendaftaran Penduduk, Pelaksanaan kegiatan ini berlokasi di Kecamatan Kotaagung Timur dengan pencapaian kinerja sampai dengan triwulan ke IV tahun 2023 yaitu 100% dengan pencapaian kinerja sebesar 100% dengan anggaran sebesar Rp.348.900,00 yang terealisasi sebesar Rp.0,00 atau 0% dengan rincian 1 Kegiatan dan 1 Sub Kegiatan sebagai berikut :

a) Kegiatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk, Pelaksanaan kegiatan ini berlokasi di Kecamatan Kotaagung Timur dengan pencapaian kinerja sampai dengan triwulan ke IV tahun 2023 yaitu 100% dengan pencapaian kinerja sebesar 100% dengan anggaran sebesar Rp.348.900,00 yang terealisasi sebesar Rp.0,00 atau 0%, Kegiatan ini terdiri dari 1 Sub Kegiatan dengan rincian Sub Kegiatan sebagai berikut :

1.) Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk, Pelaksanaan kegiatan ini berlokasi di Kecamatan Kotaagung Timur dengan pencapaian kinerja sampai dengan triwulan ke IV tahun 2023 yaitu 12 Laporan dengan pencapaian kinerja sebesar 12 Laporan dengan anggaran sebesar Rp.348.900,00 yang terealisasi sebesar Rp.0,00 atau 0%

3) Program Pencatatan Sipil, Pelaksanaan kegiatan ini berlokasi di Kecamatan Kotaagung Timur dengan pencapaian kinerja sampai dengan triwulan ke IV tahun 2023 yaitu 100% dengan pencapaian kinerja sebesar 117,71% dengan anggaran sebesar Rp. 1.011.500,00 yang terealisasi sebesar Rp. 0 atau 0% dengan rincian 1 Kegiatan dan 1 Sub Kegiatan sebagai berikut :

a) Kegiatan Pelayanan Pencatatan Sipil, Pelaksanaan kegiatan ini berlokasi di Kecamatan Kotaagung Timur dengan pencapaian kinerja sampai dengan triwulan ke IV tahun 2023 yaitu 100% dengan pencapaian kinerja sebesar 117,71% dengan anggaran sebesar Rp. 1.011.500,00 yang terealisasi sebesar Rp.0 atau 0%, Kegiatan ini terdiri dari 1 Sub Kegiatan dengan rincian Sub Kegiatan sebagai berikut :

1.) Pencatatan, Penatausahan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting, Pelaksanaan kegiatan ini berlokasi di Kecamatan Kotaagung Timur dengan pencapaian kinerja sampai dengan triwulan ke IV tahun 2023 yaitu 4.200 Dokumen dengan pencapaian kinerja sebesar 4.944 Dokumen dengan anggaran sebesar Rp. 1.011.500,00 yang terealisasi sebesar Rp.0 atau 0%

4) Program Pengelolaan Informasi Adminstrasi Kependudukan, Pelaksanaan kegiatan ini berlokasi di Kecamatan Kotaagung Timur dengan pencapaian kinerja sampai dengan triwulan ke IV tahun 2023 yaitu 100% dengan pencapaian kinerja sebesar 84,62% dengan anggaran sebesar Rp.1.604.300,00 yang terealisasi sebesar Rp.150.000,00 atau 9,35% dengan rincian dengan 1 Kegiatan dan 1 Sub Kegiatan sebagai berikut :

a.) Kegiatan Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan Penyajian Database Kependudukan, Pelaksanaan kegiatan ini berlokasi di Kecamatan Kotaagung Timur dengan pencapaian kinerja sampai dengan triwulan ke IV tahun 2023 yaitu 100% dengan pencapaian kinerja sebesar 84,62% dengan anggaran sebesar Rp.1.604.300,00 yang terealisasi sebesar Rp.150.000,00 atau 9,35%, Kegiatan ini terdiri dari 1 Sub Kegiatan dengan rincian Sub Kegiatan sebagai berikut :

1.) Kerjasama Pemanfaatan Data kependudukan, Pelaksanaan kegiatan ini berlokasi di Kecamatan Kotaagung Timur dengan pencapaian kinerja sampai dengan triwulan ke IV tahun 2023 yaitu 13 Dokumen dengan pencapaian kinerja sebesar 11 Dokumen dengan anggaran sebesar Rp. 1.604.300,00 yang terealisasi sebesar Rp.150.000,00 atau 9,35%

5) Program Pengelolaan profil Kependudukan, Pelaksanaan kegiatan ini berlokasi di Kecamatan Kotaagung Timur dengan pencapaian kinerja sampai dengan triwulan ke IV tahun 2023 yaitu 100% dengan pencapaian kinerja sebesar 66,67% dengan anggaran sebesar Rp.1.860.000,00 yang terealisasi sebesar Rp.0,00 atau 0% dengan rincian 1 Kegiatan dan 1 Sub Kegiatan sebagai berikut :

a) Kegiatan Penyusunan Profil Kependudukan, Pelaksanaan kegiatan ini berlokasi di Kecamatan Kotaagung Timur dengan pencapaian kinerja sampai dengan triwulan ke IV tahun 2023 yaitu 100% dengan pencapaian kinerja sebesar 66,67% dengan anggaran sebesar Rp.1.860.000,00 yang terealisasi sebesar Rp.0 atau 0%, Kegiatan ini terdiri dari 1 Sub Kegiatan dengan rincian Sub Kegiatan sebagai berikut :

1).Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota, Pelaksanaan kegiatan ini berlokasi di Kecamatan Kotaagung Timur dengan pencapaian kinerja sampai dengan triwulan ke IV tahun 2023 yaitu 6 Dokumen dengan pencapaian kinerja sebesar 4 Dokumen dengan anggaran sebesar Rp.1.860.000,00 yang terealisasi sebesar Rp.0,00 atau 0%

Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja PD dan pencapaian Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanggamus Tahun 2023 dapat diuraikan pada tabel 1 sebagai berikut :

Tabel 1. REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA PD DAN PENCAPAIAN RENSTRA PD S/D TAHUN 2024 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN TANGGAMUS

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Program Tahun 2023 (Akhir Periode Renstra PD)		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)						Target Program dan Kegiatan Renja PD Tahun Berjalan (2024)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun Berjalan (2024)			
											Target Renja PD Tahun 2024		Realisasi Renja PD Tahun 2024		Tingkat Realisasi (%)				Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (2024)		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
(1)					-2	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8) = (7 / 6)		(9)		(10) = (5+7+9)		(11) = (10 / 4)	
2	12				**ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**		**100**	%	**91,19**	%	**100**	%	**43,08**	%	**43,08**	%	**100**	%	**43,08**	%	**43,08**	%
2	12	01			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	**100**	%	**86,19**	%	**100**	%	**67,48**	%	**67,48**	%	**100**	%	**67,48**	%	**67,48**	%
2	12	01	2.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja yang Disusun dengan Baik dan Tepat Waktu Keuangan	**100**	%	**93,75**	%	**100**	%	**64,29**	%	**64,29**	%	**100**	%	**64,29**	%	**64,29**	%
2	12	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3	Dokumen	2	Dokumen	3	Dokumen	3	Dokumen	100,00	%	3	Dokumen	8	Dokumen	267	%
2	12	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	100,00	%	1	Dokumen	3	Dokumen	300	%
2	12	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	-	Dokumen	0,00	%	1	Dokumen	2	Dokumen	200	%
2	12	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	100,00	%	1	Dokumen	3	Dokumen	300	%
2	12	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	-	Dokumen	0,00	%	1	Dokumen	2	Dokumen	200	%
2	12	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6	Laporan	6	Laporan	6	Laporan	3	Laporan	50,00	%	6	Laporan	15	Laporan	250	%
2	12	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3	Laporan	3	Laporan	3	Laporan	3	Laporan	100,00	%	3	Laporan	9	Laporan	300	%
2	12	01	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase Laporan Keuangan yang Disusun Tepat Waktu Keuangan	**100**	%	**100**	%	**100**	%	**100**	%	**100**	%	**100**	%	**100,00**	%	**100,00**	%
2	12	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	34	Orang/Bulan	34	Orang/Bulan	34	Orang/Bulan	34	Orang/Bulan	100	%	34	Orang/Bulan	102	Orang/Bulan	300	%
2	12	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12	Dokumen	12	Dokumen	12	Dokumen	6	Dokumen	50	%	12	Dokumen	30	Dokumen	250	%
2	12	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12	Dokumen	12	Dokumen	12	Dokumen	6	Dokumen	50	%	12	Dokumen	30	Dokumen	250	%
2	12	01	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Disusun dengan Baik	**100**	%	**80**	%	**100**	%	**95,50**	%	**95,50**	%	**100**	%	**95,50**	%	**95,50**	%
2	12	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1	Paket	1	Paket	1	Paket	1	Paket	100	%	1	Paket	3	Paket	300	%
2	12	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1	Paket	1	Paket	1	Paket	1	Paket	100	%	1	Paket	3	Paket	300	%
2	12	01	2.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1	Paket	1	Paket	2	Paket	1	Paket	50	%	2	Paket	4	Paket	400	%
2	12	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	27	Laporan	21	Laporan	25	Laporan	33	Laporan	132,00	%	25	Laporan	79	Laporan	293	%

2	**12**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan PemerintahanDaerah**	Persentase Laporan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Disusun dengan Baik	**100**	%	**88,24**	%	**100**	%	**50,00**	%	**50,00**	%	**100**	%	**50,00**	%	**50,00**	%
2	12	01	2.08	02	PenyediaanJasaKomunikasi, SumberDaya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	Laporan	12	Laporan	12	Laporan	6	Laporan	50	%	12	Laporan	30	Laporan	250	%
2	12	01	2.08	03	PenyediaanJasaPeralatan danPerlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10	Laporan	6	Laporan	12	Laporan	6	Laporan	50	%	12	Laporan	24	Laporan	240	%
2	12	01	2.08	04	PenyediaanJasaPelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	Laporan	12	Laporan	12	Laporan	6	Laporan	50	%	12	Laporan	30	Laporan	250	%
2	**12**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah**	Persentase Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Disusun dengan Baik	**100**	%	**91,67**	%	**100**	%	**60,94**	%	**60,94**	%	**100**	%	**60,94**	%	**60,94**	%
2	12	01	2.09	01	PenyediaanJasaPemeliharaan, BiayaPemeliharaan dan PajakKendaraan PeroranganDinas atau KendaraanDinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1	Unit	1	Unit	1	Unit	1	Unit	100	%	1	Unit	3	Unit	300	%
2	12	01	2.09	02	PenyediaanJasaPemeliharaan, BiayaPemeliharaan, Pajak, danPerizinan KendaraanDinas Operasional atauLapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5	Unit	5	Unit	5	Unit	5	Unit	100	%	5	Unit	15	Unit	300	%
2	12	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatandan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	39	Unit	26	Unit	48	Unit	21	Unit	43,75	%	48	Unit	95	Unit	244	%
2	12	01	2.09	09	Pemeliharaan/RehabilitasiGedung Kantor danBangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	Unit	1	Unit	1	Unit	1	Unit	100	%	1	Unit	3	Unit	300	%
2	**12**	**02**			**PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK**	Persentase Penduduk yang memiliki KTP-el	**100**	%	**100**	%	**100**	%	**50**	%	**50**	%	**100**	%	**50,00**	%	**50,00**	%
2	**12**	**02**	**2.01**		**Pelayanan Pendaftaran Penduduk**	Persentase Keluarga yang memiliki Kartu keluarga	**100**	%	**100**	%	**100,00**	%	**100,00**	%	**100**	%	**100**	%	**300**	%	**300**	%
2	12	02	2.01	04	Peningkatan PelayananPendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	12	Laporan	12	Laporan	12,00	Laporan	6,00	Laporan	50	%	12	Laporan	30	Laporan	250	%
2	**12**	**03**			**PROGRAM PENCATATAN SIPIL**	**Persentase Penerbitan Akta Kelahiran**	**100**	%	**117,71**	%	**100**	%	**47,94**	%	**47,94**	%	**100**	%	**47,94**	%	**47,94**	%
2	**12**	**03**	**2.01**		**Pelayanan Pencatatan Sipil**	Persentase Penerbitan Akta Kelahiran Usia 0 -18 Tahun	**100**	%	**117,71**	%	**100**	%	**47,94**	%	**47,94**	%	**100**	%	**47,94**	%	**47,94**	%
2	12	03	2.01	01	Pencatatan,Penatausahaan danPenerbitan Dokumenatas Pelaporan PeristiwaPenting	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	4.200	Dokumen	4.944	Dokumen	4.950	Dokumen	2.373	Dokumen	47,94	%	4.950	Dokumen	12.267	Dokumen	292	%
																			-			
2	**12**	**04**			**PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASIADMINISTRASI KEPENDUDUKAN**	**Persentase OPD yang Melakukan PKS**	**100**	**%**	**84,62**	**%**	**100**	**%**	**0**	**%**	**0,00**	**%**	**100**	**%**	**0**	**%**	**0,00**	**%**
2	**12**	**04**	**2.01**		**Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan**	Persentase OPD yang mengajukan PKS	**100**	%	**84,62**	%	**100**	%	**0**	%	**0,00**	%	**100**	%	**0**	%	**0,00**	%
2	12	04	2.01	02	Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	13	Dokumen	11	Dokumen	15	Dokumen	-	Dokumen	0,00	%	15	Dokumen	26	Dokumen	200	%
																			-			
2	**12**	**05**			**PROGRAM PENGOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN**	Persentase profil Kependudukan Berdasarkan Jenis Kelamin	**100**	%	**66,67**	%	**100**	%	**50,00**	%	**50,00**	%	**100**	%	**50,00**	%	**50,00**	%
2	**12**	**05**	**2.01**		**Penyusunan Profil Kependudukan**	Persentase Penerbitan Buku Profil Kependudukan	**100**	%	**66,67**	%	**100**	%	**50,00**	%	**50,00**	%	**100**	%	**50,00**	%	**50,00**	%
2	12	05	2.01	01	Penyediaan data kependudukan kebupaten/kota	Jumlah Data Kependudukan Kabupaten/Kota	6	Dokumen	4	Dokumen	2	Dokumen	1	Dokumen	50,00	%	2	Dokumen	7	Dokumen	117	%

2.3 Analisis Kinerja Peayanan Perangkat Daerah

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai 3 (tiga) Sasaran yaitu:

1. Meningkatnya kepemilikan Dokumen Kependudukan
2. Meningkatnya Kepemilikan Dokumen Pencatatan Sipil
3. Meningkatnya Pemanfaatan Data Kependudukan

Untuk mencapai sasaran tersebut dituangkan dalam beberapa indikator Sasaran sebagai berikut :

1) Persentase Penduduk Ber-KTP
2) Persentase Keluarga Memiliki Kartu Keluarga
3) Persentase Penerbitan Kartu Identitas Anak
4) Persentase Penerbitan Akta Kutipan Kelahiran
5) Persentase Penerbitan Akta Kutipan Perkawinan
6) Persentase Penerbitan Akta Kutipan Kematian
7) Persentase Perjanjian Kerjasama Pemanfaatan Data dengan Perangkat Daerah

- Untuk meningkatkan persentase Penduduk Ber-KTP Disdukcapil melakukan pelayanan sebagai berikut :
    - PAK KAMLING (Pelayanan Perekaman Keliling)
    - Pelayanan Home Service.
    - Pelayanan ADEK CAKEP (Adminduk Kelar Pasca Kepenghulu)
    - Pelayanan Pesona Dukcapil (Pelayanan Online Dukcapil)
    - Pesona Alam (Pesona Online Antak Di Lamban)
    - Pelayanan PELAKOL (Pelayanan Kolektif)
    - Pelayanan ONKOL (Online Kolektif)
    - Penari Cantik (Perubahan Adminduk Pns, Tni, Polri Pasca Purna Bhakti)

- Untuk meningkatkan persentase Keluarga Memiliki Kartu Keluarga Disdukcapil melakukan pelayanan sebagai berikut :
    - Pelayanan Pesona Dukcapil (Pelayanan Online Dukcapil)
    - Pesona Alam (Pesona Online Antak Di Lamban)
    - Pelayanan PELAKOL (Pelayanan Kolektif)
    - Pelayanan ONKOL (Online Kolektif)
    - PELAKU SIKEP (Pelayanan Khusus Administrasi Kependudukan)
    - Pelayanan ADEK CAKEP (Adminduk Kelar Pasca Kepenghulu)
    - PASBEN (Pasca Bencana)
    - Penari Cantik (Perubahan Adminduk Pns, Tni, Polri Pasca Purna Bhakti)

- Untuk meningkatkan persentase Penerbitan Kartu Identitas Anak Disdukcapil melakukan pelayanan sebagai berikut :
    - Pelayanan Berita Asik (Pemberian Akta Kelahiran melalui Fasilitas Kesehatan)
    - PAK SEKDA (Pelayanan Akta Kelahiran, KIA Sekolah Dasar)
    - PAK SEKDA PAUD
    - Pelayanan PELAKU SIKEP (Pelayanan Khusus Administrasi Kependudukan)

- Untuk meningkatkan persentase Penerbitan Akta Kutipan Kelahiran Disdukcapil melakukan pelayanan sebagai berikut :
    - Pelayanan Pesona Dukcapil (Pelayanan Online Dukcapil)
    - Pesona Alam (Pesona Online Antak Di Lamban)
    - Pelayanan Berita Asik (Pemberian Akta Kelahiran melalui Fasilitas Kesehatan)
    - PAK SEKDA (Pelayanan Akta Kelahiran, KIA Sekolah Dasar)
    - PAK SEKDA PAUD
    - Pelayanan ONKOL (Online Kolektif)

- Untuk meningkatkan persentase Penerbitan Akta Kutipan Perkawinan Disdukcapil melakukan pelayanan sebagai berikut :
    - PAK YAN LIGAT (Paket Layanan Lintas Agama)
    - KOTAG (Kolaborasi Tokoh Agama)

- Untuk meningkatkan persentase Penerbitan Akta Kutipan Kematian Disdukcapil melakukan pelayanan sebagai berikut :
    - Paket Ke Tanggamus (Pelayanan Akta Kematian Tangga Menuju Surga)

Memperhatikan aturan yang ada betapa besar dan kompleknya tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang harus dijalankan, disamping harus memfasilitasi tugas dari SKPD – SKPD yang lain juga harus memfasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Namun, hal ini belum didukung dengan sarana dan prasarana, sumberdaya yang memadai dan anggaran yang dikelola, sehingga disadari pelaksanaan tugas dan kinerja selama ini belum optimal.

Sebagai gambaran pencapaian kinerja pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang cukup menonjol adalah pelayanan penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan penerbitan dokumen Akta Kelahiran sesuai standar SPM penerbitan KTP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam kurun waktu 5 tahun selalu memenuhi target SPM sebesar 100%. Hal ini didasari oleh memadainya SDM/aparat yang melayani di Bidang tersebut. Namun sampai saat ini laporan perkembangan kependudukan dari tingkat pekon masih banyak yang belum melaporkan dan kalaupun melaporkan belum secara continue.

Selanjutnya hasil analisis pencapaian Kinerja Pelayanan PD Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Tanggamus disajikan dalam tabel 2 :

Tabel 2. PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN PD DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN TANGGAMUS

NO	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra PD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
	SPM											
A	Penerbitan Kartu Tanda Penduduk											
1	Penerbitan Kartu Tanda Penduduk											
a	Penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP-el)	45.000		50.300	52.800	53.200	53.700	56.438	53.825	55.200	53.700	
B	Penerbitan Kartu Keluarga											
1	Penerbitan Kartu Keluarga											
a	Penerbitan Kartu Keluarga (KK)	37.000		35.400	45.700	45.900	46.200	37.727	54.579	46.300	46.800	
C	Penerbitan Akta Kelahiran											
1	Penerbitan Akta Kelahiran											
a	Penerbitan Akta Kelahiran	21.700		17.500	18.600	20.100	21.700	16.040	24.653	25.500	26.100	

2.4 Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yaitu sebagai berikut :

1. Masih belum tertibnya administrasi kependudukan;

   Sampai saat ini laporan perkembangan kependudukan dari tingkat pekon dan kecamatan masih banyak yang belum melaporkan dan kalaupun melaporkan belum secara menyeluruh.
2. Masih rendahnya tingkat kesadaran masyarakat untuk memiliki dokumen Akta Pencatatan Sipil, Khususnya Akta Perceraian;
3. Masih kurangnya pemahaman Masyarakat tentang Peraturan Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang terbaru.

Ada beberapa hal yang diinginkan dalam mendukung Program Kependudukan dan Pencatatan Sipil antara lain sebagai berikut :

1. Menjalankan Sosialisasi terus menerus kepada Masyarakat tentang Peraturan-peraturan dalam Pelayanan Dokumen Kependudukan;
2. Melakukan Koordinasi dengan Aparatur Pemerintah di tingkat Pekon, agar menunjuk salah satu Aparatur untuk melaporkan setiap peristiwa Perceraian di Pekonnya agar mendapatkan Dokumen Akta kematian dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
3. Penambahan sarana dan prasarana pelayanan dan peremajaan peralatan yang usia pemanfaatannya sudah cukup lama.

2.5 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Dari rancangan awal Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Tanggamus 2025, dimana Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil ada 5 Program 11 kegiatan dan 27 Subkegiatan. Sehubungan dengan adanya perubahan undang – undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi Kependudukan menjadi undang – undang Nomor 24 Tahun 2013, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil membagi 2 kegiatan diluar rancangan awal RKPD, yaitu kegiatan Sosialisasi Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Kegiatan Penguatan Kelembagaan unit Pelaksana Tugas Daerah (UPTD) yang ada di Kecamatan.

Berdasarkan amanat undang – undang No 24 Tahun 2013 dimana Kabupaten Tanggamus, melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai tugas dan tanggung jawab adalah sebagai berikut :

- Koordinasi penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
- Pembentukan instansi pelaksana yang tugas dan fungsinya di bidang kependudukan;
- Pengaturan teknis penyelenggaraan Administrasi Kependudukan sesuai dengan ketentuan perundang – undangan ;
- Pembinaan dan sosialisasi penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
- Pelaksanaaan kegiatan pelayanan masyarakat di bidang Kependudukan;
- Penugasan kepala desa untuk menyelenggarakan sebagian urusan administrasi kependudukan berdasarkan atas tugas pemantauan.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, selanjutnya disajikan dalam tabel 3 Review Terhadap Rancangan Awal Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai berikut :

Tabel 3. REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD KABUPATEN TANGGAMUS TAHUN 2025

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Kode					Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
					Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif	
1					2	3	4	5		6	7	8	9	10		11	12
2	12				**ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN CAPIL**	Kotaagung Timur		**100**	%	**8.992.968.141,00**	**ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN CAPIL**	Kotaagung Timur		**100**	%	**9.236.147.571,08**	
2	12	01			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHANDAERAH KABUPATEN/KOTA**	Kotaagung Timur	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	**100**	%	**8.952.735.341,00**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHANDAERAH KABUPATEN/KOTA**	Kotaagung Timur	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	**100**	%	**9.213.914.771,08**	
2	12	01	2.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi KinerjaPerangkat Daerah**	Kotaagung Timur	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja yang Disusun dengan Baik dan Tepat Waktu Keuangan	**100**	%	**6.391.400,00**	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi KinerjaPerangkat Daerah**	Kotaagung Timur	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja yang Disusun dengan Baik dan Tepat Waktu Keuangan	**100**	%	**6.391.400,00**	
2	12	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kotaagung Timur	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3	Dokumen	2.773.700,00	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kotaagung Timur	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3	Dokumen	2.773.700,00	
2	12	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kotaagung Timur	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	Dokumen	750.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kotaagung Timur	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	Dokumen	750.000,00	

2	12	01	2.01	03	Koordinasi danPenyusunan DokumenPerubahan RKA-SKPD	Kotaagung Timur	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	Dokumen	645.000,00	Koordinasi danPenyusunan DokumenPerubahan RKA-SKPD	Kotaagung Timur	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	Dokumen	645.000,00	
2	12	01	2.01	04	Koordinasi danPenyusunan DPA-SKPD	Kotaagung Timur	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1	Dokumen	600.000,00	Koordinasi danPenyusunan DPA-SKPD	Kotaagung Timur	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1	Dokumen	600.000,00	
2	12	01	2.01	05	Koordinasi danPenyusunan PerubahanDPA-SKPD	Kotaagung Timur	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1	Dokumen	660.900,00	Koordinasi danPenyusunan PerubahanDPA-SKPD	Kotaagung Timur	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1	Dokumen	660.900,00	
2	12	01	2.01	06	Koordinasi danPenyusunan LaporanCapaian Kinerja danIkhtisar Realisasi KinerjaSKPD	Kotaagung Timur	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6	Laporan	660.900,00	Koordinasi danPenyusunan LaporanCapaian Kinerja danIkhtisar Realisasi KinerjaSKPD	Kotaagung Timur	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6	Laporan	660.900,00	
2	12	01	2.01	07	Evaluasi KinerjaPerangkat Daerah	Kotaagung Timur	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3	Laporan	300.900,00	Evaluasi KinerjaPerangkat Daerah	Kotaagung Timur	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3	Laporan	300.900,00	

2	**12**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Kotaagung Timur	Persentase Laporan Keuangan yang Disusun Tepat Waktu Keuangan	**100**	**%**	**5.797.693.651,00**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Kotaagung Timur	Persentase Laporan Keuangan yang Disusun Tepat Waktu Keuangan	**100**	**%**	**5.997.566.981,08**	
2	12	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kotaagung Timur	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	33	Orang/Bulan	4.020.723.651,00	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kotaagung Timur	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	33	Orang/Bulan	4.401.987.581,08	
2	12	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kotaagung Timur	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	13	Dokumen	1.705.600.000,00	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kotaagung Timur	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	13	Dokumen	1.524.209.400,00	
2	12	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kotaagung Timur	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12	Dokumen	71.370.000,00	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kotaagung Timur	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12	Dokumen	71.370.000,00	
2	**12**	**01**	**2.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	Kotaagung Timur	Persentase Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang disusun dengan Baik	**0**	**%**	**0**	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	Kotaagung Timur	Persentase Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang disusun dengan Baik	**100**	**%**	**10.566.000,00**	
2	12	01	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Kotaagung Timur	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPS	0	Laporan	0	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Kotaagung Timur	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPS	1	Laporan	10.566.000,00	

2	**12**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Kotaagung Timur	Persentase Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang Disusun dengan Baik	**0**	%	**0**	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Kotaagung Timur	Persentase Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang Disusun dengan Baik	**100**	%	**66.000.000,00**	
2	12	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta AtributKelengkapannya	Kotaagung Timur	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	0	Paket	0	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta AtributKelengkapannya	Kotaagung Timur	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1	Paket	66.000.000,00	
2	**12**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Kotaagung Timur	Persentase Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Disusun dengan Baik	**100**	%	**441.803.840,00**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Kotaagung Timur	Persentase Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Disusun dengan Baik	**100**	%	**423.191.540,00**	
2	12	01	2.06	04	Penyediaan BahanLogistik Kantor	Kotaagung Timur	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2	Paket	51.994.000,00	Penyediaan BahanLogistik Kantor	Kotaagung Timur	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2	Paket	44.880.000,00	
2	12	01	2.06	05	Penyediaan BarangCetakan danPenggandaan	Kotaagung Timur	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1	Paket	40.958.300,00	Penyediaan BarangCetakan danPenggandaan	Kotaagung Timur	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1	Paket	30.300.000,00	
2	12	01	2.06	07	PenyediaanBahan/Material	Kotaagung Timur	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	2	Paket	65.193.540,00	PenyediaanBahan/Material	Kotaagung Timur	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	2	Paket	64.353.540,00	
2	12	01	2.06	09	Penyelenggaraan RapatKoordinasi danKonsultasi SKPD	Kotaagung Timur	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	27	Laporan	283.658.000,00	Penyelenggaraan RapatKoordinasi danKonsultasi SKPD	Kotaagung Timur	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	27	Laporan	283.658.000,00	

2	**12**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Kotaagung Timur	Persentase Laporan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Disusun dengan Baik	**100**	**%**	**2.402.881.450,00**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan PemerintahanDaerah**	Kotaagung Timur	Persentase Laporan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Disusun dengan Baik	**100**	**%**	**2.418.407.850,00**	
2	12	01	2.08	02	Penyediaan JasaKomunikasi, SumberDaya Air dan Listrik	Kotaagung Timur	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	Laporan	206.085.500,00	Penyediaan JasaKomunikasi, SumberDaya Air dan Listrik	Kotaagung Timur	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	Laporan	196.836.000,00	
2	12	01	2.08	03	Penyediaan JasaPeralatan danPerlengkapan Kantor	Kotaagung Timur	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12	Laporan	2.058.595.950,00	Penyediaan JasaPeralatan danPerlengkapan Kantor	Kotaagung Timur	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12	Laporan	2.083.371.850,00	
2	12	01	2.08	04	Penyediaan JasaPelayanan Umum Kantor	Kotaagung Timur	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	Laporan	138.200.000,00	Penyediaan JasaPelayanan Umum Kantor	Kotaagung Timur	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	Laporan	138.200.000,00	
2	**12**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah**	Kotaagung Timur	Persentase Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Disusun dengan Baik	**100**	**%**	**303.965.000,00**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah**	Kotaagung Timur	Persentase Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Disusun dengan Baik	**100**	**%**	**291.791.000,00**	
2	12	01	2.09	01	Penyediaan JasaPemeliharaan, BiayaPemeliharaan dan PajakKendaraan PeroranganDinas atau KendaraanDinas Jabatan	Kotaagung Timur	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1	Unit	47.792.000,00	Penyediaan JasaPemeliharaan, BiayaPemeliharaan dan PajakKendaraan PeroranganDinas atau KendaraanDinas Jabatan	Kotaagung Timur	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1	Unit	60.292.000,00	

2	12	01	2.09	02	Penyediaan JasaPemeliharaan, BiayaPemeliharaan, Pajak, danPerizinan KendaraanDinas Operasional atauLapangan	Kotaagung Timur	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5	Unit	177.250.000,00	Penyediaan JasaPemeliharaan, BiayaPemeliharaan, Pajak, danPerizinan KendaraanDinas Operasional atauLapangan	Kotaagung Timur	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5	Unit	152.576.000,00	
2	12	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatandan Mesin Lainnya	Kotaagung Timur	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	35	Unit	57.110.000,00	Pemeliharaan Peralatandan Mesin Lainnya	Kotaagung Timur	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	35	Unit	57.110.000,00	
2	12	01	2.09	09	Pemeliharaan/RehabilitasiGedung Kantor danBangunan Lainnya	Kotaagung Timur	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	Unit	21.813.000,00	Pemeliharaan/RehabilitasiGedung Kantor danBangunan Lainnya	Kotaagung Timur	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	Unit	21.813.000,00	
2	**12**	**02**			**PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK**	Kotaagung Timur	Persentase Penduduk yang memiliki KTP-el	**100**	**%**	**348.900,00**	**PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK**	Kotaagung Timur	Persentase Penduduk yang memiliki KTP-el	**100**	**%**	**348.900**	
2	**12**	**02**	**2.01**		**Pelayanan Pendaftaran Penduduk**	Kotaagung Timur	Persentase Keluarga yang memiliki Kartu keluarga	**100**	**%**	**348.900,00**	**Pelayanan Pendaftaran Penduduk**	Kotaagung Timur	Persentase Keluarga yang memiliki Kartu keluarga	**100**	**%**	**348.900**	
2	12	02	2.01	04	Peningkatan PelayananPendaftaran Penduduk	Kotaagung Timur	Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	12	Laporan	348.900,00	Peningkatan PelayananPendaftaran Penduduk	Kotaagung Timur	Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	12	Laporan	**348.900**	

2	**12**	**03**			**PROGRAM PENCATATAN SIPIL**	Kotaagung Timur	**Persentase Penerbitan Akta Kelahiran**	**100**	**%**	**1.011.500,00**	**PROGRAM PENCATATAN SIPIL**	Kotaagung Timur	**Persentase Penerbitan Akta Kelahiran**	**100**	**%**	**1.011.500**	
2	**12**	**03**	**2.01**		**Pelayanan Pencatatan Sipil**	Kotaagung Timur	Persentase Penerbitan Akta Kelahiran Usia 0 -18 Tahun	**100**	%	**1.011.500,00**	**Pelayanan Pencatatan Sipil**	Kotaagung Timur	Persentase Penerbitan Akta Kelahiran Usia 0 -18 Tahun	**100**	%	**1.011.500**	
2	12	03	2.01	01	Pencatatan,Penatausahaan danPenerbitan Dokumenatas Pelaporan PeristiwaPenting	Kotaagung Timur	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	4.950	Dokumen	1.011.500,00	Pencatatan,Penatausahaan danPenerbitan Dokumenatas Pelaporan PeristiwaPenting	Kotaagung Timur	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	4.950	Dokumen	1.011.500	
2	**12**	**04**			**PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASIADMINISTRASI KEPENDUDUKAN**	Kotaagung Timur	**Persentase OPD yang Melakukan PKS**	**100**	**%**	**2.752.400,00**	**PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASIADMINISTRASI KEPENDUDUKAN**	Kotaagung Timur	**Persentase OPD yang Melakukan PKS**	**100**	**%**	**2.752.400,00**	
2	**12**	**04**	**2.01**		**Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan**	Kotaagung Timur	Persentase OPD yang mengajukan PKS	**100**	**%**	**2.752.400,00**	**Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan**	Kotaagung Timur	Persentase OPD yang mengajukan PKS	**100**	**%**	**2.752.400,00**	
2	12	04	2.01	02	Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan	Kotaagung Timur	Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	10	Dokumen	2.752.400,00	Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan	Kotaagung Timur	Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	10	Dokumen	2.752.400,00	

2	**12**	**05**			**PROGRAM PENGOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN**	Kotaagung Timur	Persentase profil Kependudukan Berdasarkan Jenis Kelamin	**100**	**%**	**36.120.000,00**	**PROGRAM PENGOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN**	Kotaagung Timur	Persentase profil Kependudukan Berdasarkan Jenis Kelamin	**100**	**%**	**18.120.000,00**	
2	**12**	**05**	**2.01**		**Penyusunan Profil Kependudukan**	Kotaagung Timur	Persentase Penerbitan Buku Profil Kependudukan	**100**	**%**	**36.120.000,00**	**Penyusunan Profil Kependudukan**	Kotaagung Timur	Persentase Penerbitan Buku Profil Kependudukan	**100**	**%**	**18.120.000,00**	
2	12	05	2.01	01	Penyediaan data kependudukan kebupaten/kota	Kotaagung Timur	Jumlah Data Kependudukan Kabupaten/Kota	2	Dokumen	36.120.000,00	Penyediaan data kependudukan kebupaten/kota	Kotaagung Timur	Jumlah Data Kependudukan Kabupaten/Kota	2	Dokumen	18.120.000,00	
Jumlah										**8.992.968.141,00**	**Jumlah**					**9.236.147.571,08**	

2.6 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan administrasi kependudukan khususnya dalam pembuatan Seluruh Dokumen Kependudukan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanggamus menerapkan 17 jenis pelayanan, 17 jenis pelayanan ini sejalan dengan tuntunan pelayanan yang professional, dinamis, tertib dan tidak diskriminasi guna mencapai standar pelayanan minimal menuju pelayanan SUPER PRIMA secara menyeluruh untuk mengetahui permasalahan dan keluhan masyarakat selama ini yang selalu berasumsi bahwa pembuatan Dokumen Kependudukan identik dengan lama dan ribet.

Dalam rangka meningkatkan cakupan dan kualitas pelayanan Dokumen Kependudukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil kabupaten Tanggamus melakukan 17 jenis pelayanan, yaitu :

1. Pelayanan Pesona Dukcapil (Pelayanan Online Dukcapil)
2. Pelayanan Kolektif (Pelakol)
3. Pelayanan Online Kolektif (Onkol)
4. Pelayanan Berita Asik (Pemberian Akta Kelahiran Melalui Fasilitas Kesehatan)
5. Pelayanan Pak Kamling (Pelayanan Administrasi Kependudukan Perekaman Keliling)
6. Pelayanan Pak Sekda (Pelayanan Akta Kelahiran Sekolah Dasar)
7. Pelayanan Pak Sekda-Paud
8. Pelayanan Home Service
9. Pelayanan Pasca Bencana (Pasben)
10. Pesona Alam (Pesona Online Antak Di Lamban)
11. Paket Layanan Lintas Agama Tanggamus (Pak Yan Ligat)
12. Pelaku Sikep (Pelayanan Khusus Administrasi Kependudukan)
13. Adek Cakep (Adminduk Kelar Pasca Kepenghulu)
14. Paket Ke Tanggamus (Pelayanan Akta Kematian Tangga Menuju Surga)
15. Napas Dapduk (Nara Pidana Bebas Dapat Adminduk)
16. Penari Cantik (Perubahan Adminduk Pns, Tni, Polri Pasca Purna Bhakti)
17. Kotag (Kolaborasi Tokoh Agama)

Berdasarkan uraian tersebut diatas, selanjutnya disajikan dalam tabel 4 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat Sipil sebagai berikut :

Tabel 4. USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN DARI PARA PEMANGKU KEPENTINGAN TAHUN 2025 KABUPATEN TANGGAMUS
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

NO	Bidang/Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan *)

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Selama 78 tahun kemerdekaan, berbagai kemajuan telah berhasil dicapai oleh Bangsa Indonesia. Namun demikian, Indonesia masih terjebak sebagai negara berpendapatan menengah (*middle income trap*) yang diwarnai dengan kesenjangan antarwilayah dan antarkelompok pendapatan. Tantangan ke depan yang perlu diantisipasi terutama pergeseran demografi, perubahan teknologi yang cepat, perubahan geopolitik dan geoekonomi, serta perubahan iklim. Untuk merespons berbagai tantangan tersebut, perlu optimalisasi modal dasar yang dimiliki, antara lain bonus demografi, modal sosial budaya, kekayaan alam, dan kekuatan maritim. Sehingga cita-cita 100 tahun Indonesia merdeka atau Indonesia Emas 2045, menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia yang bersatu, berdaulat, maju, dan berkelanjutan di tahun 2045 dapat terwujud.

Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025 merupakan perencanaan tahunan di masa transisi yang menjadi tahap awal pelaksanaan berbagai agenda pembangunan untuk mew ujudkan Indonesia Emas 2045. Dengan mempertimbangkan arahan Presiden, kerangka ekonomi makro, kesinambungan pembangunan, hasil evaluasi kinerja pembangunan tahun 2023, isu strategis yang menjadi perhatian, serta forum konsultasi publik, ditetapkan tema RKP Tahun 2025 adalah **"Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan"**.

Tema Pembangunan Tahun 2025

Sumber : Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, 2024

Sasaran pembangunan nasional tahun 2025 diarahkan untuk meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi, Indeks Modal Manusia, Nilai Tukar Petani, Nilai Tukar Nelayan, dan menurunkan Tingkat Pengangguran Terbuka, Rasio Gini, Tingkat Kemiskinan, Tingkat Kemiskinan Ekstrem, serta Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca. Target indikator sasaran pembangunan tahun 2025 ditunjukkan pada infografis sebagai berikut.

Sasaran Pembangunan Tahun 2025

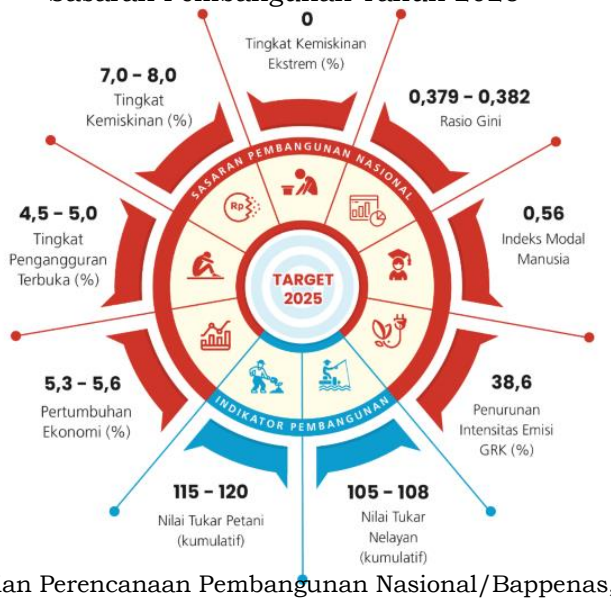

Sumber : Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, Maret 2024

Untuk menciptakan fondasi yang kuat dalam mengawal pencapaian Indonesia Emas 2045, serta untuk mencapai target sasaran pembangunan nasional tahun 2025, ditetapkan prioritas nasional sebagai berikut.

Prioritas Nasional 2025

Sumber : Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, 2024

Kerangka Ekonomi Makro Tahun 2025

Tingkat pertumbuhan ekonomi tahun 2025 akan meningkatkan Gross National Income per kapita (Atlas Method) menjadi US$5.500–5.520 atau bertahan pada kategori upper-middle income countries di tahun 2025 dan menjadi landasan awal dalam pencapaian Visi Indonesia Emas 2045.

Sasaran Ekonomi Makro Tahun 2025

No	Indikator	Sasaran 2025
1	Laju Inflasi, Indeks Harga Konsumen (IHK) (%, *yoy*): Akhir Periode	2,5±1,0[a]
2	Nilai Tukar Rupiah (Rp/USD)	15.300–15.900[a]
3	Cadangan Devisa (miliar USD)	143,3–147,2
4	Cadangan Devisa (dalam bulan impor)	5,8–5,9
5	Neraca Transaksi Berjalan (% PDB)	(0,6)–(0,6)[b] [c]
6	Kontribusi PDB Industri Pengolahan (%)	20,8
7	Rasio PDB Pariwisata (%)	4,60
8	Devisa Pariwisata (miliar USD)	22,10
9	Pendapatan Negara (% PDB)	12,30–12,36
10	Penerimaan Perpajakan (% PDB)	10,1–10,3[d]
11	Keseimbangan Primer (% PDB)	(0,14)–0,61)[a] [c]
12	Surplus/Defisit APBN (% PDB)	(2,29)–(2,82)[a] [c]
13	Stok Utang Pemerintah (% PDB)	37,82–38,71[a]
14	Pertumbuhan Investasi (PMTB) (%)	6,5–7,8
15	Nilai Realisasi PMA dan PMDN (Triliun Rp)	1.868,23–1.905,60
16	Nilai Realisasi PMA dan PMDN Sektor Sekunder (Triliun Rp)	805,5–842,2

Sumber : Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, 2024

Keterangan: a) Hasil Kesepakatan Panitia Kerja Asumsi Dasar, Kebijakan Fiskal, Pendapatan, Defisit, dan Pembiayaan dalam Rangka Pembicaraan Pendahuluan RAPBN Tahun Anggaran 2025; b) Perbedaan angka desimal dalam *range* terjadi pada dua hingga empat angka di belakang koma; c) Angka dalam kurung (x,x) bernilai negatif; d) Koordinasi dengan Kementerian Keuangan setelah Kesepakatan Panja Asumsi Dasar, Kebijakan Fiskal, Pendapatan, Defisit, dan Pembiayaan dalam Rangka Pembicaraan Pendahuluan RAPBN Tahun Anggaran 2025.

Pencapaian sasaran Pertumbuhan Ekonomi tahun 2025 sebesar 5,3–5,6 persen didukung oleh stabilitas ekonomi makro yang diupayakan terus menguat dengan memastikan indikator makro fiskal tetap berkinerja baik untuk menjamin keberlanjutan pembangunan dalam jangka menengah-panjang. Tingkat inflasi dijaga stabil dalam rentang 2,5±1,0 persen (*yoy*) dan nilai tukar Rupiah pada rentang Rp15.300– Rp15.900 per USD.

Dari sisi pengeluaran, konsumsi Rumah Tangga dan Lembaga Non-Profit yang melayani rumah tangga ditargetkan tetap tumbuh seiring dengan terjaganya daya beli masyarakat. Hal ini didukung oleh inflasi yang terjaga pada target Bank Indonesia serta peningkatan pendapatan masyarakat. Konsumsi pemerintah ditargetkan tumbuh

terjaga sejalan dengan dukungan pemerintah dalam pembangunan. Kinerja ekspor ditargetkan tumbuh didorong oleh peningkatan ekspor utamanya pada produk industri. Sementara impor akan tumbuh tinggi sejalan dengan kebutuhan pembangunan untuk penguatan fondasi transformasi. Perdagangan luar negeri diarahkan untuk dapat meningkatkan ekspor barang dan jasa bernilai tambah tinggi di pasar global melalui ekspansi serta peningkatan partisipasi Indonesia dalam rantai nilai global melalui strategi (1) sinkronisasi kebijakan dan fasilitasi sisi *supply* termasuk akses bahan baku, perizinan, sertifikasi berstandar internasional, perlindungan Hak Kekayaan Intelektual, pembiayaan dan asuransi ekspor, pengembangan produk ekspor, dan logistik ekspor; (2) harmonisasi kebijakan tarif dan nontarif Indonesia untuk meningkatkan ekspor barang bernilai tambah tinggi; (3) peningkatan kapasitas eksportir termasuk pelatihan ekspor dan bisnis *e-commerce* bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah, pengembangan *exporter tools* untuk meningkatkan kapasitas eksportir secara digital, serta pendampingan dalam rangka mendorong perdagangan hijau yang berkelanjutan; (4) integrasi informasi perdagangan internasional termasuk penyediaan *database* informasi pasar potensial dan *buyer* secara *real-time*; (5) fasilitasi pelayanan ekspor impor terintegrasi; (6) intensifikasi dan ekstensifikasi pangsa pasar produk Indonesia termasuk penguatan promosi dan misi dagang, optimalisasi *market intelligence*, dan pengamanan pasar ekspor; (7) penyediaan data perdagangan jasa serta penguatan koordinasi perdagangan sektor jasa dan kreatif; (8) penguatan usaha mikro, kecil, dan menengah untuk mendorong kemitraan dan berpartisipasi dalam rantai pasok global; (9) penguatan diplomasi untuk menurunkan hambatan perdagangan dan meningkatkan partisipasi dalam rantai nilai global serta meningkatkan efektivitas implementasi *free trade agreement/ comprehensive economic partnership agreement*.

Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia
Sasaran Utama pada Prioritas Nasional 1

Untuk mengawal keberhasilan proses Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia, telah dirumuskan sasaran dan indikator pembangunan pada tahun 2025 sebagai berikut.

Sasaran Pembangunan Prioritas Nasional 1

No	Sasaran dan Indikator	*Baseline* 2023	Target 2025
Terwujudnya kehidupan bermasyarakat, dan bernegara yang berlandaskan Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia			
1	Indeks Demokrasi Indonesia	79,51	81,69–85,23
2	Indeks Aktualisasi Pancasila	75,53[1)](2022)	79,37[a)]
3	Indeks Komunikasi Pembangunan dan Informasi Publik	69,80	71–80 (kategori baik)
4	Indeks Hak Asasi Manusia	2,70 (2022)	2,75

Sumber : Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, 2024

Keterangan: a) Baseline dan target merujuk pada Indeks Aktualisasi Pancasila Aspek Rumah Tangga/ Komunitas/Hubungan.

Arah Kebijakan

Untuk mendukung tercapainya sasaran terwujudnya kehidupan bermasyarakat dan bernegara yang berlandaskan Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia, dilaksanakan serangkaian arah kebijakan (1) memperkokoh ideologi Pancasila; (2) penguatan demokrasi; (3) pemantapan komunikasi pembangunan dan informasi publik; (4) kepemimpinan nasional yang berasaskan Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia; serta (5) transformasi akses terhadap keadilan dan pengarusutamaan hak asasi manusia. **Intervensi Kebijakan** Sebagai upaya pencapaian sasaran Prioritas Nasional 1, dilakukan serangkaian intervensi pada masing-masing arah kebijakan sebagai berikut.

1) Memperkokoh ideologi Pancasila dilaksanakan melalui (a) internalisasi dan institusionalisasi Pancasila dan wawasan kebangsaan; serta (b) aktualisasi Pancasila dan wawasan kebangsaan, dengan pendekatan pengarusutamaan ideology Pancasila sejak dini, berkesinambungan, dan berbasiskan ramah pengguna (*user friendly)*.
2) Penguatan demokrasi dilaksanakan melalui (a) penguatan kebebasan dan kesetaraan masyarakat melalui peningkatan kapasitas sumber daya manusia, kelembagaan, dan lingkungan pendukung masyarakat sipil, serta penguatan kesetaraan masyarakat Prioritas Nasional pada sektor politik; dan (b) penguatan lembaga demokrasi.
3) Pemantapan komunikasi pembangunan dan informasi publik dilaksanakan melalui (a) penguatan kesetaraan masyarakat atas informasi publik; serta (b) pembangunan media massa yang bertanggung jawab, edukatif, jujur, objektif, dan sehat industry (BEJO'S), melalui penguatan kapasitas lembaga dan insan pers yang dibarengi mewujudkan iklim penyehatan media arus utama.
4) Kepemimpinan nasional yang berasaskan Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia dilaksanakan melalui (a) peningkatan kualitas kader pemimpin di tingkat pusat hingga daerah; serta (b) peningkatan semangat persatuan, kesatuan, dan kebangsaan pada generasi muda.
5) Transformasi akses terhadap keadilan dan pengarusutamaan hak asasi manusia dilaksanakan melalui (a) transformasi pengarusutamaan hak asasi manusia; serta (b) transformasi layanan akses terhadap keadilan yang substansial terutama dan tidak terbatas bagi kelompok rentan.

Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi , Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau dan Ekonomi Biru Sasaran Utama pada Prioritas Nasional 2

Untuk mengawal keberhasilan proses pemantapan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru, telah dirumuskan sasaran pembangunan pada tahun 2025 sebagai berikut.

Sasaran Pembangunan Prioritas Nasional 2

No	Sasaran dan Indikator	*Baseline* 2023	Target 2025
Terjaganya kedaulatan negara dan penguatan stabilitas keamanan nasional sebagai fondasi pelaksanaan pembangunan			
1	Asia Power Index (*Military Capability*)	14,6 (2022)	16
2	Asia Power Index (*Diplomatic Influence*)	60,42	61,54
3	Asia Power Index (*Economic Relationship*)	12,6	12,6[a)]
4	Proporsi Penduduk yang Merasa Aman Berjalan Sendirian di Area Tempat Tinggalnya (%)	62,8 (2020)	63,5
5	Global Cybersecurity Index	94,88	94,92
6	Indeks Keamanan Laut Nasional	56	60
Meningkatnya kemandirian bangsa dalam memenuhi kebutuhan pangan, energi, dan air secara berkelanjutan			
7	Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (%)	8,53	7,21
8	Indeks Ketahanan Energi	6,64	6,77
9	Porsi EBT dalam Bauran Energi Primer (%)	13,2	20
10	Indeks Ketahanan Sumber Daya Air Nasional	3,48 (2022)	3,45–3,60
11	Kapasitas tampungan air (m^3/kapita)	60,43	63,40
12	Akses rumah tangga perkotaan terhadap air siap minum perpipaan (%)	24 (2020)	39,20
13	Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman (%)	10,21	12,5
Terwujudnya perekonomian nasional yang progresif, inklusif, dan berkelanjutan			
14	Posisi ekonomi syariah Indonesia di tingkat global (peringkat)	3	3
15	Indeks Ekonomi Hijau	59,17 (2020)	70,8
16	Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah (%)	15 (13 terdaur ulang) (2022)	24 (16 terdaur ulang)
17	Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	0,35 (2020)	0,44
18	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	72,54	76,49
19	Persentase Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK)		
	Kumulatif (%)	27,82	28,12
	Tahunan (%)	35,53 (2022)	36,65
20	Kontribusi PDB Maritim (%)	7,92 (2022)	8,1
21	*Indonesia Blue Economy Index* (IBEI)	34,25	38,76
22	Indeks Daya Saing Digital di Tingkat Global (peringkat)	45	45

Sumber : Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, 2024 Keterangan: a) Sangat sementara

Arah Kebijakan

Dalam rangka mewujudkan sasaran-sasaran pembangunan pada Prioritas Nasional 2, dilaksanakan arah kebijakan sebagai berikut:

1) Terjaganya kedaulatan negara dan penguatan stabilitas keamanan nasional sebagai fondasi pelaksanaan pembangunan, dilaksanakan melalui (a) penguatan pertahanan negara; (b) pembangunan dan pengembangan industri pertahanan; (c) penguatan sistem keamanan negara; (d) profesionalisme pelayanan kepolisian; (e) penguatan keamanan laut dan hidro- oseanografi; (f) keamanan siber, sandi, dan sinyal; (g) penguatan infrastruktur dan jejaring *smart diplomacy*; (h) diplomasi ekonomi; dan (i) hubungan internasional yang kondusif.
2) Meningkatnya kemandirian bangsa dalam memenuhi kebutuhan pangan, energi, dan air secara berkelanjutan, dilaksanakan melalui (a) swasembada pangan; (b) swasembada energi; (c) swasembada air; (d) pemenuhan akses air minum aman; serta (e) percepatan pemenuhan akses sanitasi aman untuk masyarakat;
3) Terwujudnya perekonomian nasional yang progresif, inklusif, dan berkelanjutan, dilaksanakan melalui (a) ekonomi syariah; (b) ekonomi digital; (c) ekonomi sirkular industri; (d) pengelolaan keanekaragaman ekosistem, spesies, dan genetik; (e) peningkatan kualitas lingkungan hidup dan tata ruang; (f) penerapan ekonomi sirkular dari sumber sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga secara partisipatif (hulu); (g) penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga (hilir); (h) pembangunan rendah karbon; (i) tenaga kerja hijau; (j) pengelolaan hutan lestari; serta (k) pengembangan ekonomi biru sebagai sumber pertumbuhan baru.

Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi Sasaran Utama pada Prioritas Nasional 3

Untuk mengawal keberhasilan proses pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi, telah dirumuskan sasaran pembangunan pada tahun 2025 sebagai berikut.

Sasaran Pembangunan Prioritas Nasional 3

No	Sasaran dan Indikator	*Baseline* 2023	Target 2025
Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur			
1	Stok Infrastruktur terhadap PDB (%)	43 (2019)	51[a)]
Meningkatnya Total Aset Sektor Keuangan terhadap PDB			
2	Total Aset Sektor Keuangan/PDB (%)	128,5	136,7
3	Aset Perbankan/PDB (%)	61,52	66,9
4	Aset Dana Pensiun/PDB (%)	7,0 (2022)	8,0
5	Aset Asuransi/PDB (%)	8,82	9,1
6	Kapitalisasi Pasar Modal/PDB (%)	55,84	57,8
7	Total Kredit/PDB (%)	33,94	37,8
8	Inklusi Keuangan (%)	88,70	91
Meningkatnya Lapangan Kerja yang Berkualitas			
9	Penyediaan Lapangan Kerja per Tahun (Juta orang)	4,55	3,00–3,50
10	Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDB (%)	1,07 (2021)	1,10
11	Proporsi Jumlah Usaha Kecil dan Menengah (%)	1,32 (2019)	1,44
12	Rasio Kewirausahaan (%)	3,04	3,14
Meningkatnya Nilai Tambah Pariwisata			
13	Rasio PDB Pariwisata (%)	3,60 (2022)	4,60
14	Devisa Pariwisata (Miliar USD)	14,63	22,10
Meningkatnya Proporsi PDB Ekonomi Kreatif			
15	Proporsi PDB Ekonomi Kreatif (%)	6,77	7,92

Sumber : Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, 2024
Keterangan: a) Sangat sementara

Arah Kebijakan

Dalam rangka mewujudkan sasaran-sasaran pembangunan pada Prioritas Nasional 3, dilaksanakan arah kebijakan sebagai berikut:

1) Melanjutkan pengembangan infrastruktur, dilaksanakan melalui serangkaian arah kebijakan (a) penguatan konektivitas dan layanan transportasi, (b) penguatan konektivitas dan transisi energi listrik, (c) penguatan konektivitas dan ekosistem digital, serta (d) pengembangan pengairan dan irigasi.
2) Meningkatnya total aset sektor keuangan terhadap produk domestik bruto dilaksanakan melalui arah kebijakan pendalaman sektor keuangan.
3) Meningkatnya lapangan kerja yang berkualitas dilaksanakan melalui arah kebijakan peningkatan produktivitas usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi. Peningkatan produktivitas utamanya difokuskan pada penciptaan

ekosistem usaha yang dapat mendorong usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi untuk tumbuh dan berkembang.

4) Meningkatnya nilai tambah pariwisata dilaksanakan arah kebijakan pembangunan pariwisata berkualitas dan berkelanjutan.
5) Meningkatnya proporsi produk domestic bruto ekonomi kreatif dilaksanakan arah kebijakan penguatan ekosistem ekonomi kreatif berbasis kekayaan intelektual.

Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas

Sasaran Utama pada Prioritas Nasional 4

Untuk mengawal keberhasilan proses pembangunan sumber daya manusia, sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas, telah dirumuskan sasaran pembangunan pada tahun 2025 sebagai berikut.

Sasaran Pembangunan Prioritas Nasional 4

No	Sasaran dan Indikator	*Baseline* 2023	Target 2025
Pendidikan Berkualitas yang Merata			
1	**Rata-rata nilai PISA**		
	Membaca	359 (2022)	396
	Matematika	366 (2022)	404
	Sains	383 (2022)	416
2	**Rata-rata Nilai Asesmen Tingkat Nasional**		
	Literasi Membaca	60,89	62,89
	Numerasi	51,36	54,36
3	Rata-rata lama sekolah penduduk usia 15 tahun ke atas (tahun)	9,13	9,33
4	Harapan lama sekolah (tahun)	13,15	13,32
5	Angka Partisipasi Kasar Pendidikan Tinggi (%)	31,45	33,94
6	Proporsi penduduk berusia 15 tahun ke atas yang berkualifikasi pendidikan tinggi (%)	10,12	11,12
7	Persentase pekerja lulusan pendidikan menengah dan tinggi yang bekerja di bidang keahlian menengah tinggi (%)	66,30	66,78
Kesehatan untuk Semua			
8	Usia Harapan Hidup (tahun)	72,13	74,43
9	Angka Kelahiran Total (*Total Fertility Rate*) (Rata-rata kelahiran per wanita usia subur 15–49 tahun)	2,14 (2023)	2,12
10	Angka kematian Ibu (per 100.000 kelahiran hidup)	189(2020)	122
11	Prevalensi *Stunting* (pendek dan sangat pendek) pada balita (%)	21,50	18,8
12	Insidensi Tuberkulosis (per 100.000 penduduk)	385 (2022)	272
13	Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional (%)	95 (2023)	98
Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender, dan Masyarakat Inklusif			
14	Indeks Ketimpangan Gender	0,447	0,424
15	Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga	69,53 (2022)	70,29
16	Indeks Perlindungan Anak	63,83[*]	65,20
17	Indeks Pembangunan Pemuda	60,59	64,56

18	Indeks Pembangunan Gender	91,85	92,15
19	Mobilitas Penduduk Lanjut Usia (%)	92,94	94
20	Mobilitas Penduduk Penyandang Disabilitas (%)	68,42	69
Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi			
21	Peringkat Indeks Inovasi Global	61	60
22	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	5,32	4,50–5,00
23	Pengeluaran Iptek dan Inovasi (% PDB)	0,28 (2020)	0,30
24	Tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan (%)	54,52	56,3
25	Peringkat pada SEA Games	3 (2022)	3

Sumber : Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, 2024
Keterangan: a) Sangat sementara data belum dirilis

Arah Kebijakan

Pembangunan dan pembentukan modal manusia diarahkan untuk menjamin setiap anak sejak dalam kandungan, termasuk anak dalam kondisi khusus, dapat tumbuh, berkembang, dan terlindungi dari kekerasan serta didukung oleh lingkungan keluarga dan masyarakat yang kondusif. Pembentukan modal manusia tersebut dapat terwujud apabila setiap individu sehat, terdidik, dan terlindungi. Dalam rangka mewujudkan sasaran-sasaran pembangunan, dilaksanakan arah kebijakan sebagai berikut:

1) Pendidikan berkualitas yang merata akan dicapai melalui (a) percepatan wajib belajar 13 tahun (1 tahun prasekolah dan 12 tahun pendidikan dasar dan pendidikan menengah); (b) peningkatan kualitas pengajaran dan pembelajaran; (c) penguatan pengelolaan pendidik dan tenaga kependidikan berkualitas; (d) penguatan sistem tata kelola pendidikan; (e) penguatan pendidikan tinggi dan pengembangan bidang *science, technology, engineering, art, and mathematic*; serta (f) penguatan budaya literasi untuk kreativitas, dan inovasi;
2) Kesehatan untuk semua akan dicapai melalui (a) peningkatan kesehatan dan gizi masyarakat, (b) pengendalian penyakit dan pembudayaan hidup sehat, (c) penguatan kapasitas ketahanan kesehatan, serta (d) penguatan pelayanan kesehatan dan tata kelola, yang komprehensif;
3) Keluarga berkualitas, kesetaraan gender, dan masyarakat inklusif akan dicapai melalui (a) peningkatan ketangguhan keluarga; (b) peningkatan kualitas perlindungan anak; (c) peningkatan kualitas pemuda; (d) peningkatan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan dari kekerasan; serta (e) peningkatan kesetaraan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas dan lanjut usia;

4) Iptek, inovasi, dan produktivitas ekonomi akan dicapai melalui (a) penguatan pendidikan dan pelatihan vokasi dan produktivitas tenaga kerja, (b) peningkatan kontribusi iptek dan inovasi dalam pembangunan nasional, (c) pengembangan manajemen talenta nasional, serta (d) peningkatan prestasi olahraga.

Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri

Sasaran Utama pada Prioritas Nasional 5

Untuk mengawal keberhasilan proses pembangunan hilirisasi dan industri berbasis sumber daya alam dalam meningkatkan nilai tambah dalam negeri, telah dirumuskan sasaran pembangunan pada tahun 2025 sebagai berikut.

Sasaran Pembangunan Prioritas Nasional 5

No	Sasaran dan Indikator	*Baseline* 2023	Target 2025
Meningkatnya Nilai Tambah, Produktivitas dan Daya Saing Industri Pengolahan			
1	Rasio PDB Industri Pengolahan	18,67	20,8
Integrasi Ekonomi Domestik dan Global			
2	Biaya Logistik (% PDB)	14,29 (2022)	13,5
3	Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDB)	29,3	30,1–30,2
4	Ekspor Barang dan Jasa (% PDB)	21,7	21,0–21,6

Sumber : Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, 2024

Arah Kebijakan

Prioritas Nasional 5 ditujukan untuk membangun fondasi industrialisasi yang bernilai tambah tinggi di dalam negeri, terintegrasi antarwilayah, dan berdaya saing global sehingga mampu menjadi pengungkit perekonomian regional dan nasional. Dalam rangka mewujudkan sasaransasaran pembangunan pada Prioritas Nasional5, dilaksanakan arah kebijakan sebagai berikut:

1) Meningkatnya nilai tambah, produktivitas dan daya saing industri pengolahan dilaksanakan melalui (a) pengembangan hilirisasi berbasis sumber daya alam unggulan, industri padat karya terampil, padat teknologi dan inovasi, serta berorientasi ekspor sebagai industry strategis nasional, termasuk di dalamnya penguatan industri dasar; serta (b) pengembangan aglomerasi industri di kawasan industri/kawasan ekonomi khusus prioritas sebagai pusat pertumbuhan baru.
2) Integrasi ekonomi domestik dan global dilaksanakan serangkaian arah kebijakan pengembangan integrasi ekonomi domestic dan global melalui (a)

optimalisasi *backbone* integrasi ekonomi dan perkuatan sistem logistik nasional; (b) peningkatan investasi untuk integrasi ekonomi domestik dan global; serta (c) peningkatan perdagangan domestik, antarwilayah, dan ekspor serta peningkatan partisipasi dalam rantai nilai global.

Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan Sasaran Utama pada Prioritas Nasional 6

Untuk mengawal keberhasilan proses membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan, telah dirumuskan sasaran pembangunan pada tahun 2025 sebagai berikut.

Sasaran Pembangunan Prioritas Nasional 6

No	Sasaran dan Indikator	*Baseline* 2023	Target 2025
Perlindungan sosial yang adaptif			
1	Tingkat kemiskinan	9.03 (2024)	7,0 – 8,0
2	Tingkat kemiskinan ekstrem	0,83 (2024)	0
3	Terwujudnya perlindungan sosial yang adaptif bagi seluruh penduduk (%)	0	15,00
4	Cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan (%)	31,48	43,19
5	Persentase penyandang disabilitas yang bekerja di sektor formal (%)	19,71	22
Meningkatnya akses hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan			
6	Rumah tangga dengan akses hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan (%)	63,15	67,00
Mewujudkan pembangunan kemandirian perdesaan dari bawah sebagai sumber pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan			
7	Persentase desa mandiri (%)	3,9 (2021)	4,00
Perkotaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi			
8	Proporsi kontribusi PDRB wilayah metropolitan terhadap nasional (%)	44,13 (2022)	44,35

Sumber : Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, 2024

Arah Kebijakan

Dalam rangka mewujudkan sasaran-sasaran pembangunan Prioritas Nasional 6, dilaksanakan arah kebijakan sebagai berikut:

1) Perlindungan sosial yang adaptif dilaksanakan melalui (a) satu sistem registrasi sosial ekonomi; (b) reformasi sistem jaminan sosial nasional; (c) integrasi bantuan sosial, jaminan sosial, dan pemberdayaan masyarakat yang adaptif; (d) pengembangan ekonomi perawatan (*care economy*) untuk perluasan

perlindungan sosial dan kesejahteraan; serta (e) inklusi sosial untuk kesejahteraan kelompok rentan.

2) Meningkatnya akses hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan dilaksanakan melalui penyediaan perumahan dan kawasan permukiman.
3) Mewujudkan pembangunan kemandirian perdesaan dari bawah sebagai sumber pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dilaksanakan melalui peningkatan kemandirian perdesaan yang berkelanjutan.
4) Perkotaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi dilaksanakan melalui pembangunan wilayah metropolitan dan pembangunan ibu kota nusantara.

Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan Sasaran Utama pada Prioritas Nasional 7

Untuk mengawal keberhasilan proses memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan, telah dirumuskan sasaran dan indikator pembangunan pada tahun 2025 sebagai berikut.

Sasaran Pembangunan Prioritas Nasional 7

No	Sasaran dan Indikator	*Baseline* 2023	Target 2025
Terwujudnya supremasi hukum yang transparan, adil, dan tidak memihak melalui tersusunnya fondasi kelembagaan hukum dan sistem antikorupsi			
1	Indeks Pembangunan Hukum	0,66 (2022)	0,69
2	Indeks Persepsi Korupsi	34	38
3	Indeks Materi Hukum	0,48 (2022)	0,51
4	Indeks Integritas Nasional	70,97	74,52
Terwujudnya birokrasi pemerintahan yang adaptif dan melayani			
5	Indeks Pelayanan Publik	3,78	3,68[a)]
6	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	2,79	3,00
7	Indeks Pelayanan dan Pelindungan WNI di Luar Negeri	92,97	94
No	**Sasaran dan Indikator**	***Baseline* 2023**	**Target 2025**
Terwujudnya masyarakat yang bebas dari penyalahgunaan narkoba			
8	Angka Prevalensi Penyalahguna Narkotika	1,73	1,7
Menekan potensi kerugian ekonomi, sosial, dan lingkungan akibat tindakan judi dan penyelundupan			
9	*Clearance rate* tindak pidana judi	33,28	35,00
10	*Clearance rate* tindak pidana penyelundupan	5,88	7,00
Terwujudnya tata kelola BUMN yang baik untuk meningkatkan kontribusi BUMN sebagai agen pembangunan			
11	Return on Asset (ROA) BUMN (%)	3,1 (2022)	3,4
Tercapainya peningkatan pendapatan negara yang optimal sesuai potensi perekonomian dengan tetap menjaga iklim investasi			
12	Rasio Pendapatan Negara terhadap PDB (%)	13,3	12,30–12,36
13	Rasio Penerimaan Perpajakan terhadap PDB (%)	10,31	10,1–10,3
Tercapainya tingkat inflasi yang rendah dan stabil untuk mendukung stabilitas serta pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan			
14	Tingkat Inflasi (%)	2,61	2,5 ± 1,0

Sumber : Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, 2024 Keterangan: a) Instrumen evaluasi pada tahun 2025 akan mengalami perubahan, Unit Lokus Evaluasi juga akan mengalami perubahan sehingga nilai nasional ataupun per kategori instansi pemerintah tersebut diproyeksikan akan turun.

Arah Kebijakan

Dalam rangka mewujudkan sasaran-sasaran pembangunan Prioritas Nasional 7, dilaksanakan arah kebijakan sebagai berikut:

1) Terwujudnya supremasi hukum yang transparan, adil, dan tidak memihak melalui tersusunnya fondasi kelembagaan hokum dan sistem antikorupsi dilaksanakan melalui serangkaian arah kebijakan (a) reformasi politik, (b) reformasi hukum, (c) pencegahan dan pemberantasan korupsi, (d) penguatan kelembagaan hukum, serta (e) transformasi sistem penuntutan dan *advocaat generaal.*
2) Terwujudnya birokrasi pemerintahan yang adaptif dan melayani dilaksanakan melalui serangkaian arah kebijakan (a) reformasi tata kelola pemerintahan, (b) inklusivitas dan transformasi digital layanan publik, dan (c) pelindungan warga negara Indonesia di luar negeri, tenaga kerja Indonesia, dan keamanan insani.
3) Terwujudnya masyarakat yang bebas dari penyalahgunaan narkoba dilaksanakan melalui arah kebijakan pencegahan dan pemberantasan narkoba.
4) Menekan potensi kerugian ekonomi, sosial, dan lingkungan akibat tindakan judi dan penyelundupan dilaksanakan melalui arah kebijakan penanggulangan judi dan penyelundupan.
5) Terwujudnya tata kelola Badan Usaha Milik Negara yang baik untuk meningkatkan kontribusi Badan Usaha Milik Negara sebagai agen pembangunan dilaksanakan melalui arah kebijakan peningkatan produktivitas Badan Usaha Milik Negara.
6) Tercapainya peningkatan pendapatan negara yang optimal sesuai potensi perekonomian dengan tetap menjaga iklim investasi diwujudkan dengan serangkaian arah kebijakan optimalisasi pendapatan negara yang sejalan dengan upaya untuk mewujudkan reformasi fiskal secara komprehensif, melalui optimalisasi belanja negara serta perluasan sumber dan pengembangan inovasi pembiayaan.
7) Tercapainya tingkat inflasi yang rendah dan stabil untuk mendukung stabilitas serta pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan diwujudkan dengan pengendalian inflasi yang dilaksanakan utamanya melalui pengendalian komponen inflasi harga bergejolak.

Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur Sasaran Utama pada Prioritas Nasional 8

Dalam upaya memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan alam dan budaya, serta meningkatkan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur, pada tahun 2025 dirumuskan sasaran pembangunan sebagai berikut.

Sasaran Pembangunan Prioritas Nasional 8

No	Sasaran dan Indikator	*Baseline* 2023	Target 2025
Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju			
1.	Indeks Pembangunan Masyarakat (IPMas)	62,85 (2021)	71,07
2.	Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)	57,13	58,39
3.	Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)	76,02	76,77
Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim			
4.	Proporsi Kerugian Ekonomi Langsung Akibat Bencana Relatif terhadap PDB (%)	0,14 (2022)	0,137

Sumber : Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, 2024

Arah Kebijakan

Dalam rangka mewujudkan sasaran pembangunan Prioritas Nasional 8, dilaksanakan arah kebijakan sebagai berikut:

1) Beragama maslahat dan berkebudayaan maju, dilaksanakan melalui arah kebijakan (a) penguatan kerukunan umat beragama dan layanan keagamaan transformative untuk mewujudkan kehidupan beragama maslahat, dan (b) pelestarian dan pemajuan kebudayaan serta penguatan karakter bangsa.
2) Resiliensi terhadap bencana dan perubahan iklim, dilaksanakan melalui arah kebijakan (a) pembangunan berketahanan iklim, serta (b) pengelolaan risiko bencana yang efisien dan tepat guna.

Adapun hal-hal tersebut diatas selanjutnya disajikan dalan table 5 dengan format sebagai berikut :

Tabel 5. IDENTIFIKASI KEBIJAKAN NASIONAL DAN PROVINSI PD KABUPATEN TANGGAMUS
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

No	Kebijakan Nasional/Provinsi	Sumber	Keterangan
A	**Nasional**		
1	Program Penataan Administrasi Kependudukan 1.Terwujudnya Pemberian NIK pada setiap penduduk 2. Terwujudnya Perencanaan dan Keserasian Kebijakan Kependudukan	Renstra Kementrian	
2	Terwujudnya Digitalisasi Administrasi kependudukan Untuk Pelayanan Publik	RAKORNAS Disdukcapil	
B	**Provinsi**		
1	Kebijakan Misi Ketiga : 1. Mendukung Pelaksanaan Program KTP-el 2. Melakukan Pembinaan di bidang Kependudukan 3. Melakukan Pembinaan di bidang Catatan Sipil sehingga diketahui jumlah Kelahiran, Kematian atau LAMPID diprovinsi Lampung	Renstra Provinsi	

3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Perangkat Daerah

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai Tujuan **" Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil "** yang diturunkan pada 3 (tiga) Sasaran yaitu:

1. Meningkatnya kepemilikan Dokumen Kependudukan
2. Meningkatnya Kepemilikan Dokumen Pencatatan Sipil
3. Meningkatnya Pemanfaatan Data Kependudukan

Untuk mencapai sasaran tersebut dituangkan dalam 7 (Tujuh) indikator Sasaran sebagai berikut :

1) Persentase Penduduk Ber-KTP
2) Persentase Keluarga Memiliki Kartu Keluarga
3) Persentase Penerbitan Kartu Identitas Anak
4) Persentase Penerbitan Akta Kutipan Kelahiran
5) Persentase Penerbitan Akta Kutipan Perkawinan
6) Persentase Penerbitan Akta Kutipan Kematian
7) Persentase Perjanjian Kerjasama Pemanfaatan Data dengan Perangkat Daerah

3.3 Program dan Kegiatan

Pada Tahun 2025 mendatang Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Tanggamus merencananakan akan melaksanakan 5 Program, 11 Kegiatan dan 27 Sub Kegiatan dengan Belanja Operasi sebesar Rp.8.802.550.321,08 dan Belanja Modal sebesar Rp.433.597.250,00 dengan total Belanja Daerah Rp.9.236.147.571.08.

Adapun hal-hal tersebut diatas selanjutnya disajikan dalam table 6,7 dan 8 sebagai berikut:

Tabel 6. RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PD TAHUN 2024 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2025 KABUPATEN TANGGAMUS
SUMBER DANA APBD KABUPATEN TANGGAMUS
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Target Tahun 2024				Rencana Tahun 2025					Catatan Penting ***)	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026			
							Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif *)	Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif *)	Sumber Dana **)		Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)		(9)	(10)	(11)	(12)	(13)		(14)
2	12				ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN CAPIL		Kotaagung Timur	100	%	9.231.199.705,00	Kotaagung Timur	100	%	9.236.147.571,08	APBD Kabupaten		Kotaagung Timur	100	%	10.314.872.440,00
2	12	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	Kotaagung Timur	100	%	9.226.915.005,00	Kotaagung Timur	100	%	9.213.914.771,08	APBD Kabupaten		Kotaagung Timur	100	%	10.171.872.640,00
2	12	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja yang Disusun dengan Baik dan Tepat Waktu Keuangan	Kotaagung Timur	100	%	6.391.400,00	Kotaagung Timur	100	%	6.391.400,00	APBD Kabupaten		Kotaagung Timur	100	%	38.044.700,00
2	12	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kotaagung Timur	3	Dokumen	2.773.700,00	Kotaagung Timur	3	Dokumen	2.773.700,00	APBD Kabupaten		Kotaagung Timur	3	Dokumen	28.849.900,00
2	12	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kotaagung Timur	1	Dokumen	750.000,00	Kotaagung Timur	1	Dokumen	750.000,00	APBD Kabupaten		Kotaagung Timur	1	Dokumen	1.910.600,00
2	12	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kotaagung Timur	1	Dokumen	645.000,00	Kotaagung Timur	1	Dokumen	645.000,00	APBD Kabupaten		Kotaagung Timur	1	Dokumen	1.650.000,00

2	12	01	2.01	04	Koordinasi danPenyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Kotaagung Timur	1	Dokumen	600.000,00	Kotaagung Timur	1	Dokumen	600.000,00	APBD Kabupaten		Kotaagung Timur	1	Dokumen	910.000,00
2	12	01	2.01	05	Koordinasi danPenyusunan PerubahanDPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Kotaagung Timur	1	Dokumen	660.900,00	Kotaagung Timur	1	Dokumen	660.900,00	APBD Kabupaten		Kotaagung Timur	1	Dokumen	840.000,00
2	12	01	2.01	06	Koordinasi danPenyusunan LaporanCapaian Kinerja danIkhtisar Realisasi KinerjaSKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kotaagung Timur	6	Dokumen	660.900,00	Kotaagung Timur	6	Laporan	660.900,00	APBD Kabupaten		Kotaagung Timur	6	Laporan	830.000,00
2	12	01	2.01	07	Evaluasi KinerjaPerangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kotaagung Timur	3	Dokumen	300.900,00	Kotaagung Timur	3	Laporan	300.900,00	APBD Kabupaten		Kotaagung Timur	3	Laporan	3.054.200,00
2	**12**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase Laporan Keuangan yang Disusun Tepat Waktu Keuangan	**Kotaagung Timur**	**100**	**%**	**6.016.215.151,00**	**Kotaagung Timur**	**100**	**%**	**5.997.566.981,08**	APBD Kabupaten		**Kotaagung Timur**	**100**	**%**	**6.939.941.640,00**
2	12	01	2.02	01	Penyediaan Gaji danTunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kotaagung Timur	34	Orang	4.390.155.151,00	Kotaagung Timur	33	Orang	4.401.987.581,08	APBD Kabupaten		Kotaagung Timur	33	Orang/Bulan	4.675.403.540,00
2	12	01	2.02	02	Penyediaan AdministrasiPelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kotaagung Timur	12	Dokumen	1.595.500.000,00	Kotaagung Timur	13	Dokumen	1.524.209.400,00	APBD Kabupaten		Kotaagung Timur	14	Dokumen	2.142.674.200,00
2	12	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan danPengujian/VerifikasiKeuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kotaagung Timur	12	Dokumen	30.560.000	Kotaagung Timur	12	Dokumen	71.370.000,00	APBD Kabupaten		Kotaagung Timur	12	Dokumen	121.863.900,00

2	**12**	**01**	**2.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	Persentase Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang disusun dengan Baik	Kotaagung Timur	**0**	**%**	-	Kotaagung Timur	**100**	**%**	**10.566.000,00**	APBD Kabupaten		Kotaagung Timur	**100**	%	**13.816.000**
2	12	01	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPS	Kotaagung Timur	0	Laporan	-	Kotaagung Timur	1	Laporan	10.566.000,00	APBD Kabupaten		Kotaagung Timur	1	Laporan	13.816.000,00
2	**12**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Persentase Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang Disusun dengan Baik	Kotaagung Timur	**0**	%	-	Kotaagung Timur	**100**	%	**66.000.000,00**	APBD Kabupaten		Kotaagung Timur	**100**	%	**75.250.000,00**
2	12	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta AtributKelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Kotaagung Timur	0	Paket	-	Kotaagung Timur	1	Paket	66.000.000,00	APBD Kabupaten		Kotaagung Timur	1	Paket	75.250.000,00
2	**12**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Disusun dengan Baik	Kotaagung Timur	**100**	%	**221.654.600,00**	Kotaagung Timur	**100**	%	**423.191.540,00**	APBD Kabupaten		Kotaagung Timur	**100**	%	**520.816.800,00**
2	12	01	2.06	04	Penyediaan BahanLogistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kotaagung Timur	1	Paket	57.880.800,00	Kotaagung Timur	2	Paket	44.880.000,00	APBD Kabupaten		Kotaagung Timur	2	Paket	74.871.300,00
2	12	01	2.06	05	Penyediaan BarangCetakan danPenggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kotaagung Timur	1	Paket	28.413.000,00	Kotaagung Timur	1	paket	30.300.000,00	APBD Kabupaten		Kotaagung Timur	1	Paket	60.807.100,00
2	12	01	2.06	07	PenyediaanBahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Kotaagung Timur	2	Paket	40.999.000	Kotaagung Timur	2	Paket	64.353.540,00	APBD Kabupaten		Kotaagung Timur	2	Paket	109.525.000,00
2	12	01	2.06	09	Penyelenggaraan RapatKoordinasi danKonsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kotaagung Timur	25	Laporan	91.244.000,00	Kotaagung Timur	27	Laporan	283.658.000,00	APBD Kabupaten		Kotaagung Timur	25	Laporan	275.613.400,00

2	**12**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah anDaerah**	Persentase Laporan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Disusun dengan Baik	**Kotaagung Timur**	**100**	**%**	**2.734.820.054,00**	**Kotaagung Timur**	**100**	**%**	**2.418.407.850,00**	APBD Kabupaten		**Kotaagung Timur**	**100**	**%**	**2.128.178.400,00**
2	12	01	2.08	02	Penyediaan JasaKomunikasi, SumberDaya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kotaagung Timur	12	Laporan	200.407.000	Kotaagung Timur	12	Laporan	196.836.000,00	APBD Kabupaten		Kotaagung Timur	12	Laporan	236.085.500,00
2	12	01	2.08	03	Penyediaan JasaPeralatan danPerlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kotaagung Timur	12	Laporan	2.424.813.054,00	Kotaagung Timur	12	Laporan	2.083.371.850,00	APBD Kabupaten		Kotaagung Timur	12	Laporan	1.750.437.900,00
2	12	01	2.08	04	Penyediaan JasaPelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kotaagung Timur	12	Laporan	109.600.000,00	Kotaagung Timur	12	laporan	138.200.000,00	APBD Kabupaten		Kotaagung Timur	12	Laporan	141.655.000,00
2	**12**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah an Daerah**	Persentase Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Disusun dengan Baik	**Kotaagung Timur**	**100**	**%**	**247.833.800,00**	**Kotaagung Timur**	**100**	**%**	**291.791.000,00**	APBD Kabupaten		**Kotaagung Timur**	**100**	**%**	**455.825.100,00**
2	12	01	2.09	01	Penyediaan JasaPemeliharaan, BiayaPemeliharaan dan PajakKendaraan PeroranganDinas atau KendaraanDinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Kotaagung Timur	1	Unit	23.274.000,00	Kotaagung Timur	1	Unit	60.292.000,00	APBD Kabupaten		Kotaagung Timur	1	Unit	57.350.400,00
2	12	01	2.09	02	Penyediaan JasaPemeliharaan, BiayaPemeliharaan, Pajak, danPerizinan KendaraanDinas Operasional atauLapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kotaagung Timur	5	Unit	147.940.800,00	Kotaagung Timur	5	Unit	152.576.000,00	APBD Kabupaten		Kotaagung Timur	5	Unit	272.799.700,00
2	12	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatandan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kotaagung Timur	48	Unit	47.810.000	Kotaagung Timur	35	Unit	57.110.000,00	APBD Kabupaten		Kotaagung Timur	48	Unit	87.175.000,00
2	12	01	2.09	09	Pemeliharaan /Rehabilitas iGedung Kantor danBangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kotaagung Timur	1	Gedung	28.809.000	Kotaagung Timur	1	Unit	21.813.000,00	APBD Kabupaten		Kotaagung Timur	1	Unit	38.500.000,00

2	**12**	**02**			**PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK**	Persentase Penduduk yang memiliki KTP-el	**Kotaagung Timur**	**100**	**%**	**348,900**	**Kotaagung Timur**	**100**	**%**	**348.900,00**	APBD Kabupaten		**Kotaagung Timur**	**100**	**%**	**37.542.800,00**
2	**12**	**02**	**2.01**		**Pelayanan Pendaftaran Penduduk**	Persentase Keluarga yang memiliki Kartu keluarga	**Kotaagung Timur**	**100**	**%**	**348,900**	**Kotaagung Timur**	**100**	**%**	**348.900,00**	APBD Kabupaten		**Kotaagung Timur**	**100**	**%**	**37.542.800,00**
2	12	02	2.01	04	Peningkatan PelayananPendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Kotaagung Timur	12,00	Laporan	348,900	Kotaagung Timur	12	Laporan	348.900,00	APBD Kabupaten		Kotaagung Timur	12	Laporan	37.542.800,00
2	**12**	**03**			**PROGRAM PENCATATAN SIPIL**	**Persentase Penerbitan Akta Kelahiran**	**Kotaagung Timur**	**100**	**%**	**1.011.500**	**Kotaagung Timur**	**100**	**%**	**1.011.500,00**	APBD Kabupaten		**Kotaagung Timur**	**100**	**%**	**14.976.000,00**
2	**12**	**03**	**2.01**		**Pelayanan Pencatatan Sipil**	Persentase Penerbitan Akta Kelahiran Usia 0 - 18 Tahun	**Kotaagung Timur**	**100**	%	**1.011.500**	**Kotaagung Timur**	**100**	%	**1.011.500,00**	APBD Kabupaten		**Kotaagung Timur**	**100**	%	**14.976.000,00**
2	12	03	2.01	01	Pencatatan,Penatausahaan danPenerbitan Dokumenatas Pelaporan PeristiwaPenting	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	Kotaagung Timur	4.950	Dokumen	1.011.500	Kotaagung Timur	4.950	Dokumen	1.011.500,00	APBD Kabupaten		Kotaagung Timur	5.270	Dokumen	14.976.000,00
2	**12**	**04**			**PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASIADMINISTRASI KEPENDUDUKAN**	**Persentase OPD yang Melakukan PKS**	**Kotaagung Timur**	**100**	**%**	**1.604.300**	**Kotaagung Timur**	**100**	**%**	**2.752.400,00**	APBD Kabupaten		**Kotaagung Timur**	**100**	**%**	**41.520.000,00**
2	**12**	**04**	**2.01**		**Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan**	Persentase OPD yang mengajukan PKS	**Kotaagung Timur**	**100**	**%**	**1.604.300**	**Kotaagung Timur**	**100**	**%**	**2.752.400,00**	APBD Kabupaten		**Kotaagung Timur**	**100**	**%**	**41.520.000,00**
2	12	04	2.01	02	Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	Kotaagung Timur	15	Dokumen	1.604.300	Kotaagung Timur	10	Dokumen	2.752.400,00	APBD Kabupaten		Kotaagung Timur	16	Dokumen	41.520.000,00

2	**12**	**05**			**PROGRAM PENGOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN**	Persentase profil Kependudukan Berdasarkan Jenis Kelamin	**Kotaagung Timur**	**100**	**%**	**1.320.000**	**Kotaagung Timur**	**100**	**%**	**18.120.000,00**	APBD Kabupaten		**Kotaagung Timur**	**100**	**%**	**48.961.000,00**
2	**12**	**05**	**2.01**		**Penyusunan Profil Kependudukan**	Persentase Penerbitan Buku Profil Kependudukan	**Kotaagung Timur**	**100**	**%**	**1.320.000**	**Kotaagung Timur**	**100**	**%**	**18.120.000,00**	APBD Kabupaten		**Kotaagung Timur**	**100**	**%**	**48.961.000,00**
2	12	05	2.01	01	Penyediaan data kependudukan kebupaten/kota	Jumlah Data Kependudukan Kabupaten/Kota	Kotaagung Timur	2,00	Dokumen	1.320.000	Kotaagung Timur	2	Dokumen	18.120.000,00	APBD Kabupaten		Kotaagung Timur	2	Dokumen	48.961.000,00
Jumlah										**9.231.199.705**	**Jumlah**			**9.236.147.571,08**			**Jumlah**			**10.314.872.440,00**

Tabel 7. RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PD TAHUN 2024 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2025 KABUPATEN TANGGAMUS

SUMBER DANA APBD PROVINSI

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Target Tahun 2024			Rencana Tahun 2025				Catatan Penting ***)	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif *)	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif *)	Sumber Dana **)		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
					JUMLAH						JUMLAH				JUMLAH		

Tabel 8. RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PD TAHUN 2024 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2025 KABUPATEN TANGGAMUS

SUMBER DANA APBN

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Target Tahun 2024				Rencana Tahun 2025				Catatan Penting ***)	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026			
							Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif *)	Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif *)	Sumber Dana **)		Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)		(9)	(10)	(11)	(12)	(13)		(14)
					JUMLAH							JUMLAH					JUMLAH			

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1 Program dan Kegiatan

Secara terinci Program dan Kegiatan yang dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2025 dijabarkan sebagai berikut :

1) Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kab/Kota, Pelaksanaan kegiatan ini berlokasi di Kecamatan Kotaagung Timur dengan target pencapaian kinerja tahun 2025 yaitu 100% dengan anggaran sebesar Rp.9.236.147.571,08 dengan rincian 5 Program 11 Kegiatan dan 27 Sub Kegiatan sebagai berikut :
   a) Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, Pelaksanaan kegiatan ini berlokasi di Kecamatan Kotaagung Timur dengan target pencapaian kinerja tahun 2025 yaitu 100% dengan anggaran sebesar Rp. 6.391.400,00, Kegiatan ini terdiri dari 7 Sub Kegiatan dengan rincian Sub Kegiatan sebagai berikut :
      1.) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, Pelaksanaan kegiatan ini berlokasi di Kecamatan Kotaagung Timur dengan target pencapaian kinerja tahun 2025 yaitu 3 Dokumen dengan anggaran sebesar Rp. 2.773.700,00
      2.) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Pelaksanaan kegiatan ini berlokasi di Kecamatan Kotaagung Timur dengan target pencapaian kinerja tahun 2025 yaitu 1 Dokumen dengan anggaran sebesar Rp. 750.000,00
      3.) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Pelaksanaan kegiatan ini berlokasi di Kecamatan Kotaagung Timur dengan target pencapaian kinerja tahun 2025 yaitu 1 Dokumen dengan anggaran sebesar Rp. 645.000,00
      4.) Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Pelaksanaan kegiatan ini berlokasi di Kecamatan Kotaagung Timur dengan target pencapaian kinerja tahun 2025 yaitu 1 Dokumen dengan anggaran sebesar Rp. 600,000,00

5.) Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD Pelaksanaan kegiatan ini berlokasi di Kecamatan Kotaagung Timur dengan target pencapaian kinerja tahun 2025 yaitu 1 Dokumen dengan anggaran sebesar Rp. 660,900,00
6.) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Pelaksanaan kegiatan ini berlokasi di Kecamatan Kotaagung Timur dengan target pencapaian kinerja tahun 2025 yaitu 6 Laporan dengan anggaran sebesar Rp. 660,900,00
7.) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, Pelaksanaan kegiatan ini berlokasi di Kecamatan Kotaagung Timur dengan target pencapaian kinerja tahun 2025 yaitu 3 Laporan dengan anggaran sebesar Rp. 300.900,00

b) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, Pelaksanaan kegiatan ini berlokasi di Kecamatan Kotaagung Timur dengan target pencapaian kinerja tahun 2025 yaitu 100% dengan anggaran sebesar Rp.5.997.566.981,00 Kegiatan ini terdiri dari 3 Sub Kegiatan dengan rincian Sub Kegiatan sebagai berikut :
1.) Gaji dan Tunjangan, Pelaksanaan kegiatan ini berlokasi di Kecamatan Kotaagung Timur dengan target pencapaian kinerja tahun 2025 yaitu 33 Orang dengan anggaran sebesar Rp. 4.401.987.581,08
2.) Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN, Pelaksanaan kegiatan ini berlokasi di Kecamatan Kotaagung Timur dengan target pencapaian kinerja tahun 2025 yaitu 13 Dokumen dengan anggaran sebesar Rp. 1.524.209.400,00
3.) Pelaksanaan Penatausahaan dan Penguji/Verifikasi Keuangan SKPD, Pelaksanaan kegiatan ini berlokasi di Kecamatan Kotaagung Timur dengan target pencapaian kinerja tahun 2025 yaitu 12 Dokumen dengan anggaran sebesar Rp. 71.370.000,00

c) Kegiatan Adminstrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah, Pelaksanaan kegiatan ini berlokasi di Kecamatan Kotaagung Timur dengan target pencapaian kinerja tahun 2025 yaitu 100% dengan

anggaran sebesar Rp.10.566.000,00 kegiatan ini terdiri dari 1 Sub Kegiatan dengan rincian sebagai berikut :

1.) Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD, Pelaksanaan kegiatan ini berlokasi di Kecamatan Kotaagung Timur dengan target pencapaian kinerja tahun 2025 yaitu 1 Laporan dengan anggaran sebesar Rp. 10.566.000,00

d) Kegiatan Adminstrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, Pelaksanaan kegiatan ini berlokasi di Kecamatan Kotaagung Timur dengan target pencapaian kinerja tahun 2025 yaitu 100% dengan anggaran sebesar Rp.66.000.000,00 kegiatan ini terdiri dari 1 Sub Kegiatan dengan rincian sebagai berikut :

1.) Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya, Pelaksanaan kegiatan ini berlokasi di Kecamatan Kotaagung Timur dengan target pencapaian kinerja tahun 2025 yaitu 1 Paket dengan anggaran sebesar Rp. 66.000.000,00

e) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, Pelaksanaan kegiatan ini berlokasi di Kecamatan Kotaagung Timur dengan target pencapaian kinerja tahun 2025 yaitu 100% dengan anggaran sebesar Rp.423.191.540,00, Kegiatan ini terdiri dari 4 Sub Kegiatan dengan rincian Sub Kegiatan sebagai berikut :

1.) Penyediaan Bahan Logistik Kantor, Pelaksanaan kegiatan ini berlokasi di Kecamatan Kotaagung Timur dengan target pencapaian kinerja tahun 2025 yaitu 2 Paket dengan anggaran sebesar Rp. 44.880.000,00

2.) Penyediaan Bahan Cetak dan Penggandaan, Pelaksanaan kegiatan ini berlokasi di Kecamatan Kotaagung Timur dengan target pencapaian kinerja tahun 2025 yaitu 1 Paket dengan anggaran sebesar Rp.30.300.000,00

3.) Penyediaan Bahan/Material, Pelaksanaan kegiatan ini berlokasi di Kecamatan Kotaagung Timur dengan target pencapaian kinerja tahun 2025 yaitu 2 Paket dengan anggaran sebesar Rp.64.353.540,00

4.) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, Pelaksanaan kegiatan ini berlokasi di Kecamatan Kotaagung Timur dengan target pencapaian kinerja tahun 2025 yaitu 27 Laporan dengan anggaran sebesar Rp. 283.658.000,00

f) Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, Pelaksanaan kegiatan ini berlokasi di Kecamatan Kotaagung Timur dengan target pencapaian kinerja tahun 2025 yaitu 100% dengan anggaran sebesar Rp.1.984.810.600,00, Kegiatan ini terdiri dari 3 Sub Kegiatan dengan rincian Sub Kegiatan sebagai berikut :
   1.) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, Pelaksanaan kegiatan ini berlokasi di Kecamatan Kotaagung Timur dengan target pencapaian kinerja tahun 2025 yaitu 12 Laporan dengan anggaran sebesar Rp.196.836.000,00
   2.) Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor, Pelaksanaan kegiatan ini berlokasi di Kecamatan Kotaagung Timur dengan target pencapaian kinerja tahun 2025 yaitu 12 Laporan dengan anggaran sebesar Rp.2.083.371.850,00
   3.) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor, Pelaksanaan kegiatan ini berlokasi di Kecamatan Kotaagung Timur dengan target pencapaian kinerja tahun 2025 yaitu 12 laporan dengan anggaran sebesar Rp.138.200.000,00
g) Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, Pelaksanaan kegiatan ini berlokasi di Kecamatan Kotaagung Timur dengan target pencapaian kinerja tahun 2025 yaitu 100% dengan anggaran sebesar Rp.291.791.000,00 Kegiatan ini terdiri dari 4 Sub Kegiatan dengan rincian Sub Kegiatan sebagai berikut :
   1.) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan, Pelaksanaan kegiatan ini berlokasi di Kecamatan Kotaagung Timur dengan target pencapaian kinerja tahun 2025 yaitu 1 Unit dengan anggaran sebesar Rp. 60.292.000,00
   2.) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, Pelaksanaan kegiatan ini berlokasi di Kecamatan Kotaagung Timur dengan target pencapaian kinerja tahun 2025 yaitu 5 Unit dengan anggaran sebesar Rp. 152.576.000,00
   3.) Pemeliharaan dan Peralatan Mesin Lainnya, Pelaksanaan kegiatan ini berlokasi di Kecamatan Kotaagung Timur dengan target

pencapaian kinerja tahun 2025 tahun yaitu 35 Unit dengan anggaran sebesar Rp. 57.110.000,00

4.) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya, Pelaksanaan kegiatan ini berlokasi di Kecamatan Kotaagung Timur dengan target pencapaian kinerja tahun 2025 yaitu 1 Unit dengan anggaran sebesar Rp. 21.813.000,00

2) Program Pendaftaran Penduduk, Pelaksanaan kegiatan ini berlokasi di Kecamatan Kotaagung Timur dengan target pencapaian kinerja tahun 2025 yaitu 100% dengan anggaran sebesar Rp.348.900,00, dengan rincian 1 Kegiatan dan 1 Sub Kegiatan sebagai berikut :

a.) Kegiatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk, Pelaksanaan kegiatan ini berlokasi di Kecamatan Kotaagung Timur dengan target pencapaian kinerja tahun 2025 yaitu 100% dengan anggaran sebesar Rp.348.900,00 Kegiatan ini terdiri dari 1 Sub Kegiatan dengan rincian Sub Kegiatan sebagai berikut :

1.) Peningkatan Pelanyanan Pendaftaran Penduduk, Pelaksanaan kegiatan ini berlokasi di Kecamatan Kotaagung Timur dengan target pencapaian kinerja tahun 2025 yaitu 12 laporan dengan anggaran sebesar Rp.348.900,00

3) Program Pencatatan Sipil, Pelaksanaan kegiatan ini berlokasi di Kecamatan Kotaagung Timur dengan target pencapaian kinerja tahun 2025 yaitu 100% dengan anggaran sebesar Rp.1.011.500,00, dengan rincian 1 Kegiatan dan 1 Sub Kegiatan sebagai berikut :

a) Kegiatan Pelayanan Pencatatan Sipil, Pelaksanaan kegiatan ini berlokasi di Kecamatan Kotaagung Timur dengan target pencapaian kinerja tahun 2025 yaitu 100% dengan anggaran sebesar Rp.1.011.500,00 Kegiatan ini terdiri dari 1 Sub Kegiatan dengan rincian Sub Kegiatan sebagai berikut :

1.) Pencatatan, Penatausahan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting, Pelaksanaan kegiatan ini berlokasi di Kecamatan Kotaagung Timur dengan target pencapaian kinerja tahun 2025 yaitu 4.950 Dokumen dengan anggaran sebesar Rp.1.011.500,00

4) Program Pengelolaan Informasi Adminstrasi Kependudukan, Pelaksanaan kegiatan ini berlokasi di Kecamatan Kotaagung Timur dengan target pencapaian kinerja tahun 2025 yaitu 100% dengan anggaran sebesar Rp.2.752.400,00, dengan rincian dengan 1 Kegiatan dan 1 Sub Kegiatan sebagai berikut :
   a.) Kegiatan Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan Penyajian Database Kependudukan, Pelaksanaan kegiatan ini berlokasi di Kecamatan Kotaagung Timur dengan target pencapaian kinerja tahun 2025 yaitu 100% dengan anggaran sebesar Rp.2.752.400,00 Kegiatan ini terdiri dari 1 Sub Kegiatan dengan rincian Sub Kegiatan sebagai berikut :
      1.) Kerja Sama Pemanfaatan Data kependudukan, Pelaksanaan kegiatan ini berlokasi di Kecamatan Kotaagung Timur dengan target pencapaian kinerja tahun 2025 yaitu 10 Dokumen dengan anggaran sebesar Rp. 2.752.400,00

5) Program Pengelolaan Profil Kependudukan, Pelaksanaan kegiatan ini berlokasi di Kecamatan Kotaagung Timur dengan target pencapaian kinerja tahun 2025 yaitu 100% dengan anggaran sebesar Rp.18.120.000,00, dengan rincian dengan 1 Kegiatan dan 1 Sub Kegiatan sebagai berikut :
   a.) Kegiatan Penyusunan Profil Kependudukan, Pelaksanaan kegiatan ini berlokasi di Kecamatan Kotaagung Timur dengan target pencapaian kinerja tahun 2025 yaitu 100% dengan anggaran sebesar Rp.18.120.000,00, Kegiatan ini terdiri dari 1 Sub Kegiatan dengan rincian Sub Kegiatan sebagai berikut :
      1) Penyediaan Data kependudukan Kabupaten/Kota, Pelaksanaan kegiatan ini berlokasi di Kecamatan Kotaagung Timur dengan target pencapaian kinerja tahun 2025 yaitu 2 Dokumen dengan anggaran sebesar Rp. 18.120.000,00

Adapun hal – hal tersebut diatas selanjutnya disajikan dalam table 9 sebagai berikut :

Tabel 9. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH TAHUN 2025 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2026 KABUPATEN TANGGAMUS
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah *)	Sasaran Daerah *)	Lokasi	Indikator kinerja								Pagu Indikatif Tahun 2025	Pagu Indikatif Tahun 2026	Indikator kinerja		
									Hasil Program			Keluaran Kegiatan			Hasil Kegiatan				OPD **)	Jenis Kegiatan ***)	Sumber Dana ****)
									Tolok Ukur	Target		Tolok Ukur	Target		Tolok Ukur	Target			1 / 2 / 3	1 / 2 / 3	1 / 2 / 3
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)		(8)	(9)		(10)	(11)		(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
2	12				ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN CAPIL			Kotaagung Timur		100	%		100	%		100	%	9.236.147.571,08	10.314.872.440,00	Dapat dilakukan Oleh satu OPD	Sedang Berjalan	APBD Kabupaten
2	12	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			Kotaagung Timur	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	100	%	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	100	%	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	100	%	9.213.914.771,08	10.171.872.640,00	Dapat dilakukan Oleh satu OPD	Sedang Berjalan	APBD Kabupaten
2	12	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			Kotaagung Timur	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja yang Disusun dengan Baik dan Tepat Waktu Keuangan	100	%	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja yang Disusun dengan Baik dan Tepat Waktu Keuangan	100	%	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja yang Disusun dengan Baik dan Tepat Waktu Keuangan	100	%	6.391.400,00	38.044.700,00	Dapat dilakukan Oleh satu OPD	Sedang Berjalan	APBD Kabupaten
2	12	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			Kotaagung Timur	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3	Dokumen	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3	Dokumen	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3	Dokumen	2.773.700,00	28.849.900,00	Dapat dilakukan Oleh satu OPD	Sedang Berjalan	APBD Kabupaten
2	12	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD			Kotaagung Timur	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	Dokumen	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	Dokumen	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	Dokumen	750.000,00	1.910.600,00	Dapat dilakukan Oleh satu OPD	Sedang Berjalan	APBD Kabupaten
2	12	01	2.01	03	Koordinasi danPenyusunan DokumenPerubahan RKA-SKPD			Kotaagung Timur	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	Dokumen	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	Dokumen	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	Dokumen	645.000,00	1.650.000,00	Dapat dilakukan Oleh satu OPD	Sedang Berjalan	APBD Kabupaten
2	12	01	2.01	04	Koordinasi danPenyusunan DPA-SKPD			Kotaagung Timur	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1	Dokumen	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1	Dokumen	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1	Dokumen	600.000,00	910.000,00	Dapat dilakukan Oleh satu OPD	Sedang Berjalan	APBD Kabupaten

2	12	01	2.01	05	Koordinasi danPenyusunan PerubahanDPA-SKPD			Kotaagung Timur	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1	Dokumen	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1	Dokumen	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1	Dokumen	660.900,00	840.000,00	Dapat dilakukan Oleh satu OPD	Sedang Berjalan	APBD Kabupaten
2	12	01	2.01	06	Koordinasi danPenyusunan LaporanCapaian Kinerja danIkhtisar Realisasi KinerjaSKPD			Kotaagung Timur	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6	Laporan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6	Laporan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6	Laporan	660.900,00	830.000,00	Dapat dilakukan Oleh satu OPD	Sedang Berjalan	APBD Kabupaten
2	12	01	2.01	07	Evaluasi KinerjaPerangkat Daerah			Kotaagung Timur	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3	Laporan	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3	Laporan	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3	Laporan	300.900,00	3.054.200,00	Dapat dilakukan Oleh satu OPD	Sedang Berjalan	APBD Kabupaten
2	**12**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**			**Kotaagung Timur**	Persentase Laporan Keuangan yang Disusun Tepat Waktu Keuangan	**100**	%	Persentase Laporan Keuangan yang Disusun Tepat Waktu Keuangan	**100**	%	Persentase Laporan Keuangan yang Disusun Tepat Waktu Keuangan	**100**	%	**5.997.566.981,08**	**6.939.941.640,00**	Dapat dilakukan Oleh satu OPD	Sedang Berjalan	APBD Kabupaten
2	12	01	2.02	01	Penyediaan Gaji danTunjangan ASN			Kotaagung Timur	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	33	Orang/Bulan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	33	Orang/Bulan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	33	Orang/Bulan	4.401987.581,08	4.675.403.540,00	Dapat dilakukan Oleh satu OPD	Sedang Berjalan	APBD Kabupaten
2	12	01	2.02	02	Penyediaan AdministrasiPelaksanaan Tugas ASN			Kotaagung Timur	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	13	Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	13	Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	13	Dokumen	1.524.209.400,00	2.142.674.200,00	Dapat dilakukan Oleh satu OPD	Sedang Berjalan	APBD Kabupaten
2	12	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan danPengujian/VerifikasiKeuangan SKPD			Kotaagung Timur	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12	Dokumen	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12	Dokumen	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12	Dokumen	71.370.000,00	121.863.900,00	Dapat dilakukan Oleh satu OPD	Sedang Berjalan	APBD Kabupaten
2	**12**	**01**	**2.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**			**Kotaagung Timur**	Persentase Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang disusun dengan Baik	**100**	%	Persentase Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang disusun dengan Baik	**100**	%	Persentase Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang disusun dengan Baik	**100**	%	**10.566.000,00**	**13.816.000,00**	Dapat dilakukan Oleh satu OPD	Sedang Berjalan	APBD Kabupaten
2	12	01	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah			Kotaagung Timur	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPS	1	Laporan	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPS	1	Laporan	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPS	1	Laporan	10.566.000,00	13.816.000,00	Dapat dilakukan Oleh satu OPD	Sedang Berjalan	APBD Kabupaten

2	**12**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**			Kotaagung Timur	Persentase Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang Disusun dengan Baik	**100**	%	Persentase Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang Disusun dengan Baik	**100**	%	Persentase Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang Disusun dengan Baik	**100**	%	**66.000.000,00**	**75.250.000,00**	Dapat dilakukan Oleh satu OPD	Sedang Berjalan	APBD Kabupaten
2	12	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta AtributKelengkapannya			Kotaagung Timur	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1	Paket	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1	Paket	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1	Paket	66.000.000,00	75.250.000,00	Dapat dilakukan Oleh satu OPD	Sedang Berjalan	APBD Kabupaten
2	**12**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**			Kotaagung Timur	Persentase Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Disusun dengan Baik	**100**	%	Persentase Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Disusun dengan Baik	**100**	%	Persentase Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Disusun dengan Baik	**100**	%	**423.191.540,00**	**520.816.800,00**	Dapat dilakukan Oleh satu OPD	Sedang Berjalan	APBD Kabupaten
2	12	01	2.06	04	Penyediaan BahanLogistik Kantor			Kotaagung Timur	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2	Paket	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2	Paket	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2	Paket	44.880.000,00	74.871.300,00	Dapat dilakukan Oleh satu OPD	Sedang Berjalan	APBD Kabupaten
2	12	01	2.06	05	Penyediaan BarangCetakan danPenggandaan			Kotaagung Timur	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1	Paket	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1	Paket	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1	Paket	30.300.000,00	60.807.100,00	Dapat dilakukan Oleh satu OPD	Sedang Berjalan	APBD Kabupaten
2	12	01	2.06	07	PenyediaanBahan/Material			Kotaagung Timur	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	2	Paket	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	2	Paket	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	2	Paket	64.353.540,00	109.525.000,00	Dapat dilakukan Oleh satu OPD	Sedang Berjalan	APBD Kabupaten
2	12	01	2.06	09	Penyelenggaraan RapatKoordinasi danKonsultasi SKPD			Kotaagung Timur	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	27	Laporan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	27	Laporan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	27	Laporan	283.658.000,00	275.613.400,00	Dapat dilakukan Oleh satu OPD	Sedang Berjalan	APBD Kabupaten
										..			..			...						
2	**12**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan PemerintahanDaerah**			**Kotaagung Timur**	Persentase Laporan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Disusun dengan Baik	**100**	**%**	Persentase Laporan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Disusun dengan Baik	**100**	**%**	Persentase Laporan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Disusun dengan Baik	**100**	**%**	**2.418.407.850,00**	**2.128.178.400,00**	Dapat dilakukan Oleh satu OPD	Sedang Berjalan	APBD Kabupaten
2	12	01	2.08	02	Penyediaan JasaKomunikasi, SumberDaya Air dan Listrik			Kotaagung Timur	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	Laporan	196.836.000,00	236.085.500,00	Dapat dilakukan Oleh satu OPD	Sedang Berjalan	APBD Kabupaten
2	12	01	2.08	03	Penyediaan JasaPeralatan danPerlengkapan Kantor			Kotaagung Timur	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12	Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12	Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12	Laporan	2.083.371.850,00	1.750.437.900,00	Dapat dilakukan Oleh satu OPD	Sedang Berjalan	APBD Kabupaten
2	12	01	2.08	04	Penyediaan JasaPelayanan Umum Kantor			Kotaagung Timur	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	Laporan	138.200.000,00	141.655.000,00	Dapat dilakukan Oleh satu OPD	Sedang Berjalan	APBD Kabupaten

2	**12**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**			**Kotaagung Timur**	Persentase Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Disusun dengan Baik	**100**	%	Persentase Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Disusun dengan Baik	**100**	%	Persentase Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Disusun dengan Baik	**100**	%	**291.791.000,00**	**455.825.100,00**	Dapat dilakukan Oleh satu OPD	Sedang Berjalan	APBD Kabupaten
2	12	01	2.09	01	Penyediaan JasaPemeliharaan, BiayaPemeliharaan dan PajakKendaraan PeroranganDinas atau KendaraanDinas Jabatan			Kotaagung Timur	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1	Unit	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1	Unit	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1	Unit	60.292.000,00	57.350.400,00	Dapat dilakukan Oleh satu OPD	Sedang Berjalan	APBD Kabupaten
2	12	01	2.09	02	Penyediaan JasaPemeliharaan, BiayaPemeliharaan, Pajak, danPerizinan KendaraanDinas Operasional atauLapangan			Kotaagung Timur	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5	Unit	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5	Unit	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5	Unit	152.576.000,00	272.799.700,00	Dapat dilakukan Oleh satu OPD	Sedang Berjalan	APBD Kabupaten
2	12	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatandan Mesin Lainnya			Kotaagung Timur	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	35	Unit	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	35	Unit	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	35	Unit	57.110.000,00	87.175.000,00	Dapat dilakukan Oleh satu OPD	Sedang Berjalan	APBD Kabupaten
2	12	01	2.09	09	Pemeliharaan /RehabilitasiGedung Kantor danBangunan Lainnya			Kotaagung Timur	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	Unit	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	Unit	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	Unit	21.813.000,00	38.500.000,00	Dapat dilakukan Oleh satu OPD	Sedang Berjalan	APBD Kabupaten
2	**12**	**02**			**PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK**	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Meningkatnya Tertib Administrasi Kependudukan	**Kotaagung Timur**	Persentase Penduduk yang memiliki KTP-el	**100**	%	Persentase Penduduk yang memiliki KTP-el	**100**	%	Persentase Penduduk yang memiliki KTP-el	**100**	%	**348.900,00**	**37.542.800,00**	Dapat dilakukan Oleh satu OPD	Sedang Berjalan	APBD Kabupaten
2	**12**	**02**	**2.01**		**Pelayanan Pendaftaran Penduduk**		Meningkatnya Pelayanan Pendaftaran Pendududk	**Kotaagung Timur**	Persentase Keluarga yang memiliki Kartu keluarga	**100**	%	Persentase Keluarga yang memiliki Kartu keluarga	**100**	%	Persentase Keluarga yang memiliki Kartu keluarga	**100**	%	**348.900,00**	**37.542.800,00**	Dapat dilakukan Oleh satu OPD	Sedang Berjalan	APBD Kabupaten
2	12	02	2.01	04	Peningkatan PelayananPendaftaran Penduduk			Kotaagung Timur	Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	12	Laporan	Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	12	Laporan	Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	12	Laporan	348.900,00	37.542.800,00	Dapat dilakukan Oleh satu OPD	Sedang Berjalan	APBD Kabupaten

2	**12**	**03**			**PROGRAM PENCATATAN SIPIL**	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Meningkatnya Tertib Administrasi Pencatatan Sipil	**Kotaagung Timur**	**Persentase Penerbitan Akta Kelahiran**	**100**	**%**	**Persentase Penerbitan Akta Kelahiran**	**100**	**%**	**Persentase Penerbitan Akta Kelahiran**	**100**	**%**	**1.011.500,00**	**14.976.000,00**	Dapat dilakukan Oleh satu OPD	Sedang Berjalan	APBD Kabupaten
2	**12**	**03**	**2.01**		**Pelayanan Pencatatan Sipil**		Meningkatnya Pelayanan Pencatatan Sipil	**Kotaagung Timur**	Persentase Penerbitan Akta Kelahiran Usia 0 - 18 Tahun	**100**	%	Persentase Penerbitan Akta Kelahiran Usia 0 - 18 Tahun	**100**	%	Persentase Penerbitan Akta Kelahiran Usia 0 - 18 Tahun	**100**	%	**1.011.500,00**	**14.976.000,00**	Dapat dilakukan Oleh satu OPD	Sedang Berjalan	APBD Kabupaten
2	12	03	2.01	01	Pencatatan,Penatausahaan danPenerbitan Dokumenatas Pelaporan PeristiwaPenting			Kotaagung Timur	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	4.950	Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	4.950	Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	4.950	Dokumen	1.011.500,00	14.976.000,00	Dapat dilakukan Oleh satu OPD	Sedang Berjalan	APBD Kabupaten
2	**12**	**04**			**PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASIADMINISTRASI KEPENDUDUKAN**	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Meningkatnya PKS yang telah ditandatangani	**Kotaagung Timur**	**Persentase OPD yang Melakukan PKS**	**100**	**%**	**Persentase OPD yang Melakukan PKS**	**100**	**%**	**Persentase OPD yang Melakukan PKS**	**100**	**%**	**2.752.400,00**	**41.520.000,00**	Dapat dilakukan Oleh satu OPD	Sedang Berjalan	APBD Kabupaten
2	**12**	**04**	**2.01**		**Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan**		Meningkatnya OPD yang telah mengusulkan PKS	**Kotaagung Timur**	Persentase OPD yang mengajukan PKS	**100**	**%**	Persentase OPD yang mengajukan PKS	**100**	**%**	Persentase OPD yang mengajukan PKS	**100**	**%**	**2.752.400,00**	**41.520.000,00**	Dapat dilakukan Oleh satu OPD	Sedang Berjalan	APBD Kabupaten
2	12	04	2.01	02	Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan			Kotaagung Timur	Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	10	Dokumen	Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	10	Dokumen	Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	10	Dokumen	2.752.400,00	41.520.000,00	Dapat dilakukan Oleh satu OPD	Sedang Berjalan	APBD Kabupaten
2	**12**	**05**			**PROGRAM PENGOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN**	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Meningkatnya Akurasi Data Kependudukan	**Kotaagung Timur**	Persentase profil Kependudukan Berdasarkan Jenis Kelamin	**100**	**%**	Persentase profil Kependudukan Berdasarkan Jenis Kelamin	**100**	**%**	Persentase profil Kependudukan Berdasarkan Jenis Kelamin	**100**	**%**	**18.120.000,00**	**48.961.000,00**	Dapat dilakukan Oleh satu OPD	Sedang Berjalan	APBD Kabupaten
2	**12**	**05**	**2.01**		**Penyusunan Profil Kependudukan**		Meningkatnya Penyusunan Profil Kependudukan	**Kotaagung Timur**	Persentase Penerbitan Buku Profil Kependudukan	**100**	**%**	Persentase Penerbitan Buku Profil Kependudukan	**100**	**%**	Persentase Penerbitan Buku Profil Kependudukan	**100**	**%**	**18.120.000,00**	**48.961.000,00**	Dapat dilakukan Oleh satu OPD	Sedang Berjalan	APBD Kabupaten
2	12	05	2.01	01	Penyediaan data kependudukan kebupaten/kota			Kotaagung Timur	Jumlah Data Kependudukan Kabupaten/Kota	2	Dokumen	Jumlah Data Kependudukan Kabupaten/Kota	2	Dokumen	Jumlah Data Kependudukan Kabupaten/Kota	2	Dokumen	18.120.000,00	48.961.000,00	Dapat dilakukan Oleh satu OPD	Sedang Berjalan	APBD Kabupaten
Jumlah																		**9.236.147.571,08**	**10.314.872.440,00**			

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tahun 2025 merupakan bagian dari Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanggamus tahun 2024-2026 sekaligus untuk mendukung terwujudnya Tujuan Pemerintah Daerah, Sasaran Pemerintah Daerah Kabupaten Tanggamus.

Renja ini disusun sedemikian rupa untuk dijadikan pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Tanggamus tahun 2024, serta untuk melanjutkan dan meletakkan kerangka dasar pembangunan di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Tanggamus dan dapat memberikan manfaat bagi pembangunan kabupaten Tanggamus, khususnya dalam pembanguanan bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan dapat mendukung terwujudnya Tujuan Pemerintah Daerah kabupaten Tanggamus, yaitu **"Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik"** dengan didukung dengan Sasaran Pemerintah Daerah yaitu **"Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Daya Saing Daerah".**

Kotaagung, 10 Juli 2024
Kepala Dinas Kependudukan
dan Pencatatan Sipil

PEMERINTAH KABUPATEN TANGGAMUS
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

MARADONA, S.STP., M.Si
NIP. 19790903 199810 1 001